Katalog BPS:

NERACA PEMERINTAHAN UMUM INDONESIA

GENERAL GOVERNMENT ACCOUNTS OF INDONESIA

2003 – 2008

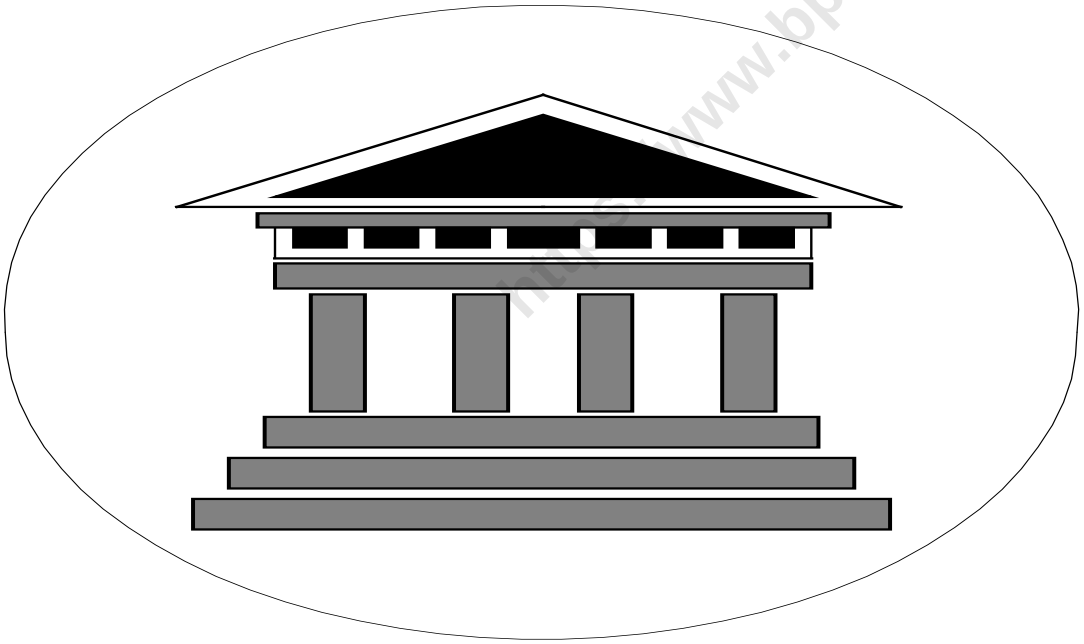

http://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik

https://www.bps.go.id

NERACA PEMERINTAHAN UMUM INDONESIA

GENERAL GOVERNMENT ACCOUNTS OF INDONESIA

2003 – 2008

http://www.bps.go.id

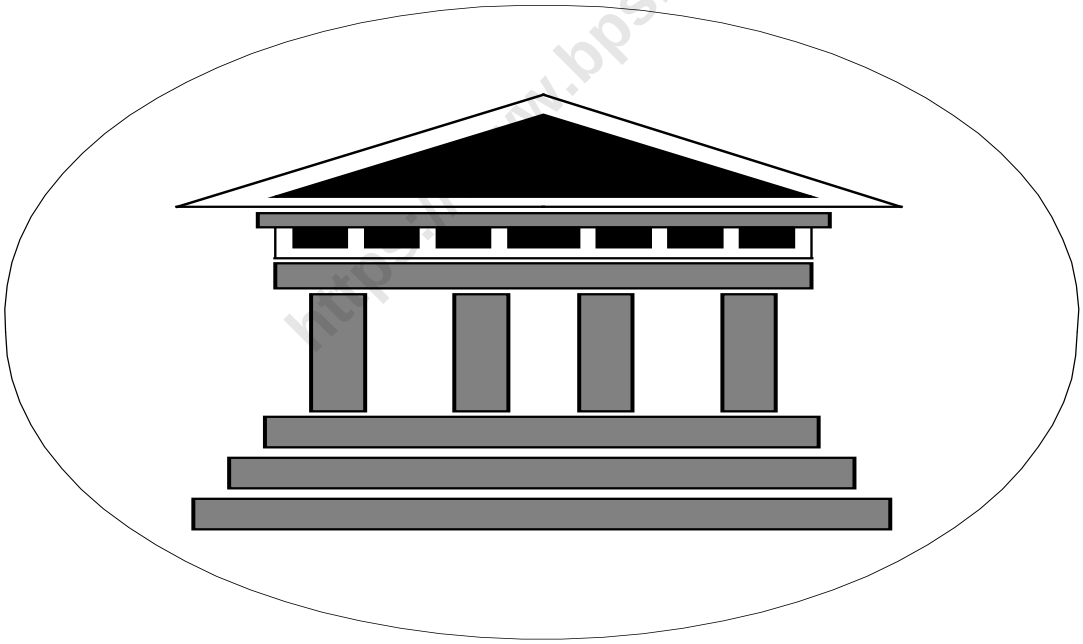

Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

NERACA PEMERINTAHAN UMUM INDONESIA 2003-2008
GENERAL GOVERNMENT ACCOUNTS OF INDONESIA 2003-2008

ISSN :
No Publikasi / ***Publication Number***:
Katalog BPS / ***BPS Catalogue***:

Ukuran Buku / ***Book Size***: 21 cm x 28 cm
Jumlah Halaman / ***Total Pages***: 102

Naskah / ***Manuscript*:**
Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha
Government and Enterprise Accounts Subdirectorate

Gambar Kulit / ***Cover Design***:
Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha
Government and Enterprise Accounts Subdirectorate

Diterbitkan oleh / ***Published by***:
Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia
BPS - Statistics Indonesia

Dicetak oleh / ***Printed by***:
Bagian Penggandaan
Printing Division

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya
May be cited with references to the source

https://www.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2003-2008 ini merupakan publikasi lanjutan dari publikasi sebelumnya yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa perbaikan telah dilakukan dalam publikasi ini baik mengenai konsep dan definisi maupun metode estimasi yang digunakan, terutama disebabkan oleh perkembangan data yang tersedia. Seperti publikasi sebelumnya, dalam publikasi ini disajikan neraca pemerintahan umum menurut tingkatannya, yaitu : Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.

Tabel-tabel dalam publikasi ini memuat angka-angka Neraca Pemerintahan Umum tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, yang disajikan dalam bentuk nilai rupiah, persentase maupun grafik. Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai ketiga neraca yang disajikan, dalam publikasi ini juga diuraikan konsep dan definisi masing-masing rincian neraca tersebut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran dari para pembaca dan pemakai data sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Semoga buku ini bermanfaat.

https://www.bps.go.id

Jakarta, Desember 2009

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

RUSMAN HERIAWAN

https://www.bps.go.id

PREFACE

This general government accounts of Indonesia 2003-2008 publication is the latest of its kind. In this publication, some improvements have been made due to the availability of new data, especially those related to concept and definition as well as methods of estimation. As in the previous publications, the general government accounts data are presented in detail according to administrative levels: Central, Provincial, Regency and Village.

Tables in this publication cover data for the years 2003-2008 and are presented in the form of absolute values, percentages, and graphics. Concept and definition related to the characteristics are also available to avoid misinterpretation.

Finally, to those who have contributed to the successful completion of this publication, we express our thanks. Suggestions for the improvement on the forthcoming publications will be appreciated. We hope this publication will be useful.

https://www.bps.go.id

Jakarta, December 2009
BPS - STATISTICS INDONESIA
Chief Statistician,

RUSMAN HERIAWAN

https://www.bps.go.id

DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

Halaman/Page

KATA PENGANTAR/*PREFACE* i

DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS* iii

DAFTAR DIAGRAM/*LIST OF DIAGRAMS* v

DAFTAR TABEL/*LIST OF TABLES* vii

DAFTAR GRAFIK/*LIST* OF *GRAPHS* ix

DAFTAR LAMPIRAN/*LIST OF APPENDICES* xi

I PENDAHULUAN/*INTRODUCTION* 1

II DATA DAN METODOLOGI/*DATA SOURCES AND METHODOLOGY* 5

2.1 Sumber Data/Data Sources 5

2.2 Metodologi/Methodology 10

2.2.1 Neraca Produksi /*Production Account* 12

2.2.2 Neraca Penerimaan dan Pengeluaran /*Income and Outlay Account* 21

2.2.3 Neraca Modal /*Capital Account* 30

III ANALISIS DESKRIPTIF KOMPONEN NERACA PEMERINTAHAN UMUM *2003-2008*/ *DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE ACCOUNTS' COMPONENTS 2003-2008* 39

3.1 Biaya Antara/*Intermediate Input* 42

3.2 Belanja Pegawai/*Compensation of Employees* 44

3.3 Pengeluaran Konsumsi/*Consumption Expenditure* 47

3.4 Tabungan Bruto/*Gross Savings* 49

3.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation* 54

3.6 Subsidi/*Subsidies* 54

3.7 Pajak/*Taxes* 55

TABEL LAMPIRAN/*APPENDIX* 61

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR DIAGRAM / *LIST OF DIAGRAMS*

Halaman/Page

Diagram 2.1 Neraca Produksi Pemerintahan Umum
Diagram *General Government's Production Account* 38

Diagram 2.2 Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pem. Umum
Diagram *General Government's Income and Outlay Account* 38

Diagram 2.3 Neraca Modal Pemerintahan Umum
Diagram *General Government's Capital Account* 38

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL / *LIST OF TABLES*

Halaman/Page

Tabel/*Tabel* 3.1 Persentase Komponen - Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum/*Percentage of General Government Accounts' Components to the Total General Government Revenue* 41

Tabel/*Tabel* 3.2 Proporsi Biaya Antara Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of Intermediate Input of General Government's Material Expenditure by Level of Government* 43

Tabel/*Tabel* 3.3 Persentase Komponen - Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Produk Domestik Bruto/*Percentage of General Government Accounts' Components to the Gross Domestic Product* 45

Tabel/*Tabel* 3.4 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government's Compensation of Employees by Level of Government* 46

Tabel/*Tabel* 3.5 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government's Consumption Expenditure by Level of Government* 48

Tabel/*Tabel* 3.6 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Tabungan Bruto Pemerintahan Umum terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional/ *Percentage of General Government's Gross Fixed Capital Formation and Gross Savings to the National Gross Fixed Capital Formation*..... 50

https://www.bps.go.id

Tabel 3.7 Proporsi Tabungan Bruto Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government's Gross Savings by Level of Government* 52

Tabel 3.8 Proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto Pemerintahan Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government's Gross Fixed Capital Formation by Level of Government* 53

Tabel 3.9 Proporsi Penerimaan Pajak Pemerintahan Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government's Total Tax Revenue by Level of Government* 57

https://www.bps.go.id

DAFTAR GRAFIK/*LIST OF GRAPH*

Halaman/Page

Grafik/*Graph* 3.1 Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum/*Percentage of General Government Accounts' Components to the Total General Government's Revenue* 41

Grafik/*Graph* 3.2 Proporsi Biaya Antara Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of Intermediate Input of General Government's Material Expenditure by Level of Government* 43

Grafik/*Graph* 3.3 Grafik Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Produk Domestik Bruto/*Percentage of General Government Accounts' Components to the Gross Domestic Product* 45

Grafik/*Graph* 3.4 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government Compensation of Employees By Level of Government* 46

Grafik/*Graph* 3.5 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government Consumption Expenditure By Level of Government* 48

Grafik/*Graph* 3.6 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Tabungan Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional/*Percentage of General Government's Gross Fixed Capital Formation and General Government's Gross Saving to the National Gross Fixed Capital Formation* 51

https://www.bps.go.id

Grafik 3.7 Proporsi Tabungan Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government Gross Savings By Level of Government* 52

Grafik 3.8 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government Gross Fixed Capital Formation By Level of Government* 53

Grafik 3.9 Proporsi Penerimaan Pajak Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan/*Proportion of General Government Total Tax Revenue By Level of Government* 57

https://www.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN/*LIST OF APPENDICES*

Halaman/Page

Lampiran *Appendix*	1.a	Neraca Produksi Pemerintahan Umum/*Production Account of General Government*, Tahun /*Year*: 2003-2008	63
Lampiran *Appendix*	1.b	Neraca Produksi Pemerintah Pusat/*Production Account of Central Government*, Tahun/*Year*: 2003-2008	64
Lampiran *Appendix*	1.c	Neraca Produksi Pemerintah Propinsi/*Production Account of Provincial Government*, Tahun/*Year*: 2003-2008	65
Lampiran *Appendix*	1.d	Neraca Produksi Pemerintah Kabupaten/Kota / *Production Account of Regencial Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008	66
Lampiran *Appendix*	1.e	Neraca Produksi Pemerintah Desa / *Production Account of Village Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008	67
Lampiran *Appendix*	2.a	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Umum/*Income and Outlay Account of General Government*, Tahun/*Year*: 2003-2008	68
Lampiran *Appendix*	2.b	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Pusat / *Income and Outlay Account of Central Government*, Tahun/*Year*: 2003-2008	70
Lampiran *Appendix*	2.c	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Propinsi/*Income and Outlay Account of Provincial Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008	72
Lampiran *Appendix*	2.d	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota/*Income and Outlay Account of Regencial Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008	74
Lampiran *Appendix*	2.e	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa / *Income and Outlay Account of Village Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008	76
Lampiran *Appendix*	3.a	Neraca Modal Pemerintahan Umum / *Capital Account of General Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008	78

https://www.bps.go.id

Lampiran *Appendix* 3.b Neraca Modal Pemerintah Pusat / *Capital Account of Central Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008 80

Lampiran *Appendix* 3.c Neraca Modal Pemerintah Propinsi / *Capital Account of Provincial Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008 82

Lampiran *Appendix* 3.d Neraca Modal Pemerintah Kabupaten/Kota / *Capital Account of Regencial Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008 84

Lampiran *Appendix* 3.e Neraca Modal Pemerintah Desa / *Capital Account of Village Government*, Tahun / *Year*: 2003-2008 86

https://www.bps.go.id

I. PENDAHULUAN/*INTRODUCTION*

Sektor pemerintah umum di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh lembaga dan instansi negara, baik yang ada di pusat maupun unit vertikalnya di daerah. Sedangkan pemerintah daerah mencakup seluruh unit pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pelaksanaan dan kebijakan pembangunan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah adalah merupakan suatu tatanan yang integral dari pembangunan nasional. Oleh karenanya keberhasilan pembangunan baik di pusat maupun di daerah merupakan wujud keberhasilan pembangunan secara nasional.

General government sector in Indonesia consists of central and local government. Whereas central government covers all governmental institutions, either those located in the capital city or their vertical units in all over the country, local governments comprise all units of province governments, regency governments and village governments. Policies and implementations of development at any level of government make an integral system of the whole national development. So, the achievements of development in every level of governments reflect the achievement of national development.

https://www.bps.go.id

Kebijakan keuangan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai saat ini didasarkan pada prinsip anggaran cara terpadu, dengan upaya terus memupuk terbentuknya tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah merupakan selisih dari penerimaan negara dan pengeluaran/belanja negara. Salah satu penggunaan yang bersumber dari tabungan pemerintah ini adalah pembiayaan aparatur

Up to now, policies in public finance as depicted in central government's budget (APBN) and local government's budget (APBD), are based on balanced and dynamic budgeting principle in order to increase the government's saving. Government's saving is the excess of domestic revenue over expenditure. Compensation of government employees, which includes wages and salaries of central and local government employees, is one of the expenses which funded by government's saving. Increasing

pemerintah yang meliputi belanja pegawai pusat dan belanja pegawai daerah. Peningkatan belanja pegawai ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas aparatur pemerintah, serta diharapkan mampu pula untuk mendorong meningkatnya efisiensi pembangunan ekonomi nasional.

Berbagai sumbangan dan bantuan kepada daerah merupakan penjabaran dari kemauan politik pemerintah pusat dalam upaya mendorong pemerintah daerah untuk lebih mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dalam bidang-bidang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan bantuan keuangan tersebut diarahkan untuk mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan yang serasi antara pusat dan daerah, dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis. Salah satu upaya dalam memobilisasi dana pembangunan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah sendiri (PDS) yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota, sehingga diharapkan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan semakin berkurang.

on compensation of government's employees is to improve the level of quality and welfare of government's employees. Besides, it motivates the efficiency of the national economic development.

Various aids and assistance carried on by central government to local governments are reflections of central government's political will to motivate local governments in improving their capabilities in governmental tasks, public service and regional development on each field assigned. Policies on financial aids were planned to support and also to establish a good financial linkage between central and local government which is basically required to maintain dynamic and established balance in inter-regional development. One main effort to mobilize regional development fund is conducted by increasing its own regional revenues. Those revenues comprise regional self-attained revenues and land tax, either on provincial or regencial level. The result is gradually reduction of central government aids to local governments at both levels.

https://www.bps.go.id

Secara ekonomi, pemerintah suatu negara adalah konsumen dan sekaligus produsen yang besar. Di tangan pemerintah juga biasanya terletak kendali finansial Negara, Oleh karena itu segala tindakan pemerintah yang menyangkut ketiga macam kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang besar atas kegiatan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas daripada perencanaan yang seksama merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Sedangkan perencanaan yang baik harus berlandaskan pada data yang lengkap, terpercaya dan berkesinambungan termasuk data dari sektor pemerintah. Salah satu yang lazim digunakan untuk menyusun data statistik sektor pemerintah adalah dengan menyajikannya dalam bentuk suatu sistem neraca baku.

Publikasi ini menyajikan neraca pemerintahan umum selama kurun waktu 2003–2008 berdasarkan *System of National Accounts* (SNA) 1968. Penggunaan SNA 1968 ini dilakukan karena penerapan SNA 1993 belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan data.

Publikasi ini disajikan dalam tiga bab. Setelah bab pendahuluan ini, dijelaskan sumber data dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan neraca pemerintahan umum. Pada bab ini dijelas-

Beside transfer to the region, economically, the government of a nation is simultaneously a large consumer as well as a large producer. Usually the financial policy-making of the nation also lies in its hands. For these reasons, government's decisions on those three broad categories of activities will substantially affect the activities of other economic sectors.

The successful economic achievement basically is the result of careful and intelligent planning, which is based on complete and reliable data. Therefore, complete, reliable and continuous data on the economic performance of the government, including statistics on government economic performance compiled in a standard set of accounts are needed.

This publication is particularly designed for the presentation of general government accounts during the period 2003-2008 based on the 1968 System of National Accounts (SNA). This system is used due to the fact that the data has not suitable information for implementing the new version of the SNA.

This publication consists of three chapters. Following this introductory chapter, we explain data sources and methodology used in estimating general government accounts which covers concept

https://www.bps.go.id

kan pula konsep dan definisi dari setiap rincian neraca pemerintah umum yang berdasarkan pada *Draft Manual on Public Sector Statistics* yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 1979. Selanjutnya, pada bab III disajikan analisis deskriptif beberapa komponen penting dalam neraca pemerintahan umum.

and definition for all components in the accounts. The concept and definition is taken from "Draft Manual on Public Sector Statistic" published by the United Nations in 1979. Finally, in chapter three we briefly analyze some important components of the accounts.

https://www.bps.go.id

II. SUMBER DATA DAN METODOLOGI/ *DATA SOURCES AND METHODOLOGY*

2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Data realisasi APBN diperoleh dari Departemen Keuangan, sedangkan data realisasi APBD diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS. Dalam APBN/APBD terdapat tiga kelompok anggaran yaitu (i) kelompok pendapatan/penerimaan, (ii) kelompok belanja/pengeluaran dan (iii) kelompok pembiayaan. Penjelasan ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

2.1 Data Sources

In this publication we used central and local government's budget taken from Directorate of Central Government's Budget Formulation, Directorate General of Budget, Ministry of finance and Directorate of Finance, Information Technology, and Tourism Statistics, BPS-Statistics Indonesia. In general, these governments's budget can be classified into three categories as revenues, expenditures, and financing. These categories will be explained as follow.

2.1.1 Pendapatan/Penerimaan

Dalam APBN, penerimaan pemerintah pusat terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri mencakup penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam (SDA) seperti penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan, bagian pemerintah pusat atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PNBP lainnya seperti penerimaan dari lembaga/ departemen yaitu penerimaan pendidikan,

2.1.1 Revenues

In the central government's budget, government's revenues cover domestic revenues and grants. Domestic revenues consist of tax revenues and non-tax revenues such as natural resources revenues, profit transfer from state-owned enterprises, and other non-tax revenues. Furthermore, this other non-tax revenues cover revenue from education, health, justice, and others revenues. On the other hands, in the local governments's budget, revenues consist of regional taxes and levies, profit transfer from local government

https://www.bps.go.id

kesehatan, kejaksaan dan pengadilan, luar negeri dan lain-lain. Sedangkan dalam APBD, penerimaan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Selain PAD, penerimaan pemerintah daerah juga mencakup dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/SDA, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

2.1.2 Belanja/Pengeluaran

Sejak disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian belanja pemerintah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan diterapkan dengan melaksanakan sistem penganggaran secara terpadu (*unified budget*), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan; dan mereklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Tujuan perubahan format adalah sebagai berikut: Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui: (a) meminimalisasikan duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan (b) meningkatkan keterkaitan antara

-owned enterprises, and transfer from central government in term of revenue sharing (tax and natural resources), general allocation fund (DAU) and special allocation fund (DAK).

2.1.2 Expenditures

Following the implementation of Law No. 17/2003 about State Finance, items on government's expenditures have been modified. Modification was applied through adopting unified budget system by joining routine and development expenditures and reclassification of government expenditures such as by organizations, functions, and types of expenditures. The aims of this modification are as follow: first, to achieve transparency and accountability of government expenditure throughout (a) reducing duplicate work-plan and budget, (b) increasing interdependency between output and outcomes and second, to facilitate comparative analysis between Indonesian state budget and that of other countries.

https://www.bps.go.id

keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai dengan penganggaran organisasi. Kedua, menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain.

Dalam format baru, belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Khusus untuk belanja pemerintah pusat, perubahan pokok sebagai akibat penyempurnaan format APBN, antara lain sebagai berikut: (a) dengan sistem *unified budget*, rincian belanja negara menurut jenis belanja (ekonomi) tidak lagi memisahkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, (b) rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan kementerian negara/lembaga yang ada, dan tercantum dalam UU APBN, (c) rincian belanja menurut jenis terdiri dari delapan jenis belanja, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja rutin lainnya, belanja modal, belanja hibah, dan bantuan sosial. (d) pengeluaran pembangunan dalam format lama dikonversikan dalam format baru dan terdistribusikan seluruhnya ke dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan klasifikasi belanja pemerintah daerah terdiri dari belanja langsung dan

In the new format, expenditures are still classified into central government expenditures and transfer to region. In the central government expenditures, the modification as follows: (a) in the unified system, the expenditure is not longer divided into routine and development expenditure, (b) expenditure's items by organization are presented according to available department/institution as stated in the law about central government's budget, (c) there are eight types of expenditure such as compensation of employees, material expenditures, interest payment of loans, subsidies, grants, capital expenditures, social assistance, and other expenditures, (d) the development expenditures as in the old format of the expenditure are converted into the new format and are distributed into eight types of expenditures as mentioned before. On the other hands, classification of local governments's expenditures consists of direct and indirect expenditures. While direct expenditures cover compensation of employees, material expenditures, and capital expenditures, indirect expenditures

https://www.bps.go.id

belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bagi hasil dengan pemerintah kabupaten/kota/ desa, transfer kepada pemerintah kabupaten/kota/desa, dan belanja lain-lain.

Disamping menurut jenis belanja, belanja juga dirinci menurut fungsi yang merupakan reklasifikasi atas program-program yang terdapat dalam format lama, rincian berupa sektor/subsektor. Meskipun merupakan reklasifikasi, namun program-program dalam format baru (*unified budget*) tidak bisa dipersandingkan dengan program-program dalam format lama, karena terdapat perbedaan program. Pengalokasian dalam format APBN yang baru didasarkan pada program-program yang diusulkan oleh kementerian negara/lembaga. Selanjutnya, program-program tersebut dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan subfungsinya. Dengan demikian, rincian anggaran belanja menurut fungsi merupakan kompilasi dari anggaran program-program kementerian negara/ lembaga dan digunakan sebagai alat analisis (*tools of analysis*) yang digunakan untuk menganalisa fungsi-fungsi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan *international*

cover compensation of employees, interest payment of loans, subsidies, grants, social assistance, revenues sharing to districts and villages government, transfer to districts and villages government, and other expenditures.

Besides, state expenditures are also divided into several functions and these functions are reflection of reclassification of programs and sub-programs in the old format. Eventhough functions are resulted from reclassification of the programs, programs in each function are not the same with those in the old format. The reason is that programs in the new format are proposed by departments/institutions and then those programs are classified based on their function. As a result, expenditures by functions are compilation of departments/ institutions' programs and it is used as tools of analysis in analyzing functions which applied, are applying, and will apply by the government. Furthermore, the implementation of the classification expenditure by functions shows that Indonesian government has implemented the Classification of Functions of Government (CoFoG) which suggested by the United Nations Statistics Division (UNSD). This classification is also adopted

https://www.bps.go.id

best practices. Pengklasifikasian menurut fungsi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengacu pada *Classification of the Functions of Government* (CoFoG) yang disusun oleh *United Nations Statistics Division* (UNSD) dan diadopsi oleh *Government Finance Statistics* (GFS) manual 2001-IMF (*International Monetary Fund*). APBN dengan CoFoG sedikit berbeda terutama karena dilakukan pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya dan agama (*recreation, culture, and religion*). Dengan demikian, dalam APBN rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari 11 fungsi: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

by International Monetary Fund (IMF) in the Government Finance Statistics manual. Nevertheless, the expenditures by functions are not exactly the same with CoFoG. This is because the classification of expenditures separates religion from recreation, culture, and religion function in the CoFoG. So that, in the state budget, expenditures by functions consist of (1) public administration, (2) defence, (3) security, (4) economy, (5) environment, (6) housing and public facilities, (7) health, (8) tourism and culture, (9) religion, (10) education, and (11) social security.

https://www.bps.go.id

2.1.3 Pembiayaan

Dalam rangka mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri, sejak tahun 1999, pembiayaan luar negeri secara bertahap dikurangi. Sebaliknya, kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang, diupayakan untuk dapat dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri. Hal ini, terutama dimaksudkan untuk menunjang

2.1.3 Financing

In order to reduce dependency of foreign funds, since 1999 foreign financing has been reducing gradually. So that, the need to financing for reducing the state budget deficit and paying loan is taken from domestic sources. This effort is usefull to reach fiscal sustainability. This policy is implementing through three basic strategies such as (i) increasing domestic financing sources, (ii) reducing the

langkah-langkah konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN dalam mendukung terwujudnya ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*). Kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dititik beratkan pada tiga strategi pokok, yaitu: (i) peningkatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri; (ii) penurunan stok utang secara bertahap; dan (iii) pemenuhan kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.

2.2 Metodologi

Di banyak negara, pemerintah pada berbagai tingkat mempunyai peranan yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pihak seperti pembuat keputusan, pembuat undang-undang, peneliti, pengamat, wartawan, dan masyarakat lainnya perlu mengetahui tentang taraf dan arah pertumbuhan dari sektor pemerintah. Salah satu statistik makro yang berhubungan dengan pengukuran kegiatan pemerintah tersebut adalah neraca sektor publik, sebagai salah satu bagian dari sistem neraca nasional.

Dilihat dari sudut aktivitas maka sektor publik dibedakan dalam dua kelompok yaitu kelompok pemerintahan umum dan kelompok badan usaha milik negara. Pemerintahan umum mencakup

outstanding loans gradually, and (iii) loans payment on time.

2.2 Methodology

In many countries, governments at various levels have important role in the economic and social affairs of their society. It is necessary, therefore, that decision makers, legislators, researchers, journalists, commentators, ordinary citizens etc. to be informed about the stage and direction of development of the government sector. One of the statistics at macro-level closely associated with the measurement of government activities is the system of public sector accounts, a subset of the national accounting system.

From the activities point of view, the public sector is classified into two groups, general government and public enterprises. According to the UN definitions, the general government services essentially consist of

https://www.bps.go.id

semua departemen dan non departemen, badan dan lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dan pertahanan, dan semua pengadaan pelayanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang tidak dipungut bayaran atau pembayarannya di bawah biaya produksi.

Dengan demikian, pemerintahan umum mencakup:

a. Badan-badan yang tidak mencari untung, seperti sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, museum, perpustakaan dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni, yang dibiayai dari keuangan pemerintah,
b. Instansi pemerintah yang memproduksi barang dan jasa yang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta dan berkaitan erat dengan kegiatan instansi tersebut serta keuangannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan utama instansi itu, seperti unit-unit percetakan di kantor-kantor pemerintah yang menjual publikasi, kartu pos bergambar dan reproduksi karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan, dan lain-lain. Penjualan yang dimaksud di sini hanya bersifat insidental dari fungsi pokok

governmental departments, ministries, offices and other bodies engaged in public administration and defence, the operation of social security schemes and the provision of community, social and economic services which are free of charge or at prices that are not economically significant.

Therefore, general government consists of:

a. *Non-profit institutions that are mainly financed on a regular basis by the government, such as public schools and universities, hospitals, museums, libraries, and art galleries,*

b. Public bodies that produce goods and non-financial services of a kind often provided by business enterprises, but the production activities are so integrated with those of their parent body that their production accounts cannot be isolated. For instances, publication unit in governmental offices selling books, small public unit selling postcards and art reproduction in museums, public experimental unit selling seeds, etc. However, these transaction activities are only incidental activities of the bodies in which these units are affiliated.
lembaga tersebut,

https://www.bps.go.id

c. Instansi yang menyediakan pelayanan finansial tetapi tidak berwenang untuk melakukan transaksi finansial sendiri.

Dalam menyusun neraca pemerintahan umum Indonesia, sektor pemerintah umum dibagi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun dinas vertikalnya di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

United Nations menyarankan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu, seperti tahunan atau triwulanan kedalam seperangkat neraca yang terdiri dari neraca produksi, neraca penerimaan dan pengeluaran, dan neraca modal. Berikut dijelaskan ketiga neraca tersebut.

2.2.1 Neraca Produksi

Yang dimaksud dengan neraca produksi pemerintahan umum adalah suatu neraca/tabel yang memuat transaksi mengenai aktivitas produksi yang dilakukan pemerintah umum. Seperti diketahui, transaksi/kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai seperti

c. Public bodies that provide financial services but have no authority to engage in financial transactions.

In order to estimate general government's accounts, general government sector is divided into central government and local government. While central government comprises of all government institutions both in central government and their vertical units in the region, local government comprises of provinces, districts, and villages government.

The United Nations recommends that all transactions made by government should be compiled in the form of accounts consisting of production account, income and outlay account, and capital account.

2.2.1 Production Account

A production account of general government is an account which is used to capture production activities conducted by the government. As we know, government's activities are providing public services for the society which is difficult to measure economically such as government administration, maintaining national security stability, increasing people educati-

https://www.bps.go.id

melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan penduduk, mengatur kebijakan perekonomian negara dan lain-lain. Dengan demikian kegiatan pemerintah berbeda dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lainnya baik dalam ciri struktur biaya maupun dalam pembelanjaannya.

onal and health level, creating state economic policies and so forth. Therefore, the government's activities are different with those of other sectors, specifically in term of costs and expenditures' structure.

Mengingat kegiatan pemerintah sulit diukur, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pengeluaran sehingga keluaran (output) sama dengan masukan (input).

As government's activities are difficult to measure, we use expenditure approach in measuring output meaning that total output will be the same with total input.

Disamping itu, mengingat kegiatan pemerintah pada umumnya berupa pelayanan jasa kepada masyarakat yang tidak diperjualbelikan di pasar, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlakukan sebagai suatu unit produksi yang mengkonsumsi sebagian besar dari produksinya. Bagian produksi yang dikonsumsi sendiri itu diperoleh dari pengurangan hasil penjualan barang-barang yang diproduksi dan jasa pelayanan yang diberikan terhadap total input. Dengan perkataan lain, rincian produksi yang dikonsumsi sendiri ini digunakan sebagai faktor penyeimbang.

Besides, the major activity is providing public services to the society which is not available in the market, so the government, both central and local, is considering as a production unit which consume most of its output. The part of production which is comsumed by the government itself is estimated by substracting the revenues from goods and services sold from total input. In other words, own-consumed production is treated as balancing item in the production account of general government.

Neraca produksi pemerintahan umum ini menggambarkan biaya- biaya di sisi kiri dan produksi di sisi kanan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah umum

The production account of general government describes expenses in the left-side and productions in the right-side. These expenses spent by the general

https://www.bps.go.id

dalam penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat, terdiri dari biaya antara yang mencakup belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja rutin lainnya, belanja pegawai dan penyusutan serta pajak tak langsung dan jumlah dari rincian-rincian tersebut merupakan total masukan (*input*). Sedangkan produksi mencakup produksi yang dikonsumsi sendiri, pendapatan dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi dan jasa yang diberikan. Total keluaran (*output*) merupakan penjumlahan dari ketiga rincian tersebut.

Pengeluaran yang dimaksud mencakup pengeluaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri oleh pemerintah umum. Berikut ini dijelaskan masing-masing rincian yang terdapat dalam neraca produksi pemerintahan umum.

government are expenses which are intended for providing goods and services for the society. These expenses cover intermediate input such as materials expenses, social assistance expenses, and other routine expenses, compensation of employees, depreciation, and indirect tax. The summing up of these expenses is total input. On the other hands, general government's production covers own-consumed production, revenues from goods and services sold. The summing up of these productions is total input.

The production activities covering in the account is not only the activities among domestic institutions but also with the rest of the world. Following we explain each account's components more deeply.

https://www.bps.go.id

2.2.1.1 Biaya Antara

Biaya antara adalah pengeluaran pemerintah umum untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama yang habis dipakai dalam proses produksi.

Pengeluaran pemerintah pusat untuk biaya antara terdiri dari:

1. Pembelian alat-alat tulis, barang cetakan dan alat-alat rumah tangga kantor,
2. Sewa gudang dan kantor,
3. Biaya pengepakan, pengiriman, dan penyimpanan barang,

2.2.1.1 Intermediate Input

Intermediate input is general government expenditure for the acquisition of non-durable goods which means that the goods is used up in the production process.

The items covered by the central government's intermediate input are:

1. *Purchases of writing utensils, printing material, and other office supplies,*
2. *Rental payments on storage and office spaces,*
3. *Costs of packing, storing, and transporting goods,*

4. Bahan makanan (biaya rapat),
5. Biaya penerimaan tamu,
6. Biaya listrik, telefon, teleks, dan air bersih,
7. Biaya pemeliharaan (gedung dan kantor, kendaraan dan inventaris kantor),
8. Biaya perjalanan dinas,
9. Pengeluaran rutin lainnya (belanja lain-lain), dan
10. Belanja bantuan sosial.

Sedangkan untuk pemerintah daerah pada prinsipnya sama dengan pemerintah pusat, tetapi dibedakan menurut belanja langsung yang disebut juga dengan belanja pelayanan publik dan belanja tidak langsung (belanja aparatur daerah). Rincian belanja tersebut adalah belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan belanja lain-lain.

4. *Meeting costs,*
5. *Guest reception costs,*
6. *Utility expenses,*
7. *Maintenance costs (building, office, vehicle, and office stationery),*
8. *Business travelling,*
9. *Other routine expenditure,*
10. *Social assistance expenses.*

This procedure is the same with that in local government. However, in the local government's budget, expenses are classified into direct expenditures (public services expenditures) and indirect expenditures (personnel expenditures). These expenses cover goods and services expenditures, business travelling expenditures, maintenance expenditures, and other expenditures.

https://www.bps.go.id

2.2.1.2 Balas Jasa Pegawai

Balas jasa pegawai terdiri dari unsur-unsur berikut.

1. Upah dan gaji dalam bentuk uang,
2. Upah dan gaji dalam bentuk barang,
3. Iuran untuk dana jaminan sosial (*social security schemes*),
4. Iuran untuk dana pensiun, dan

2.2.1.2 Compensation of employees

Compensation of employees include

1. *Wages and salaries in cash*
2. *Wages and salaries in kinds*
3. *Retribution to social security schemes,*
4. *Retribution to pension funds,*

5. Asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, tabungan hari tua dan lain-lain yang sejenisnya.

Upah dan gaji dalam bentuk uang untuk pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil, TNI dan Polri) meliputi gaji pokok beserta tunjangan, seperti tunjangan liburan serta tunjangan-tunjangan selama tidak hadir sementara karena sakit, tunjangan biaya hidup, dan sebagainya, juga termasuk uang lembur, honor, bonus khusus, dan lain-lain. Namun, setiap pembayaran yang dilakukan oleh karyawan untuk membeli alat kerja, perlengkapan atau pakaian khusus, berdasarkan perjanjian tidak dianggap sebagai bagian dari upah dan gaji.

Sedangkan upah dan gaji dalam bentuk barang terdiri dari beras, gula, pakaian jadi, sedangkan untuk TNI dan Polri termasuk juga lauk pauk, pakaian seragam, perumahan keluarga dan lain-lain. Upah dan gaji berupa barang ini bisa saja diberikan secara cuma-cuma atau dibeli dengan harga rendah.

Iuran jaminan sosial adalah sumbangan yang disediakan pemerintah untuk pegawainya baik pegawai sipil maupun TNI dan Polri. Unsur yang terakhir ialah iuran yang direncanakan oleh majikan yang dalam hal ini pemerintah untuk keperluan bantuan pensiun, bantuan keluarga, asuransi kecelakaan dan

5. Accident and life insurance, old-age savings, and the like.

Wages and salaries in cash for public officials (civil servants, military personnel, and policemen) consist of principal plus additional wages for vacation, cost of living, etc. In addition, this additional wages are also including overtime salaries, honoraria, special bonuses, etc. However it is agreed that expenditure made by public officials to purchase working equipment such as special devices or uniforms are not included as part of salaries.

Wages and salaries in kind are goods provided by the government for civil servants and military personnel, such as rice, sugar, clothing, and those exclusively provided for the military i.e., allowances for meals, uniforms, family housing etc. These items may be provided free of charge or at lower prices.

Contributions to social security schemes are a type of grant given by the government to civil servants or to military personnel. The latter is retribution accumulated by employers for the purposes of pension support, family aid, accident and health insurance, life insurance, and other benefits for employees.

https://www.bps.go.id

kesehatan, asuransi jiwa dan bantuan yang sejenis yang memberikan keuntungan bagi pegawai/karyawan.

2.2.1.3 Penyusutan Barang Modal

Penyusutan barang modal adalah penyisihan pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru, karena barang modal yang lama pada suatu saat tidak dapat berfungsi seperti biasa lagi. Pada umumnya, penyisihan pendapatan ini dihitung berdasarkan nilai beli barang-barang modal yang dipakai. Dalam neraca produksi pemerintahan umum karena data penyusutan tidak tersedia, maka nilai penyusutan diestimasi sebesar 20 persen dari pembentukan modal pemerintah umum yang merupakan total belanja modal.

2.2.1.3 Depreciation

Depreciation of fixed capital is that part of income put aside for the purpose of replacing the existing fixed capital items with new items, when the existing capital items do not function properly. The value of this depreciation is usually an estimate which depends on the purchase value of the capital being considered. Because of lack of data, an estimate value of 20 percent of capital expenses is being used in the compilation of the general government production account.

2.2.1.4 Pajak Tak Langsung Neto

Pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi. Pajak tak langsung yang dibayar pemerintah umum hanya pajak atau retribusi atas kegiatan di sektor *real estate* dan pajak atas *commodities produced*. Data mengenai pajak tak langsung neto yang dibayarkan pemerintah umum sampai sekarang belum tersedia, sehingga rincian ini masih kosong.

2.2.1.4 Net Indirect Taxes

Net indirect taxes are the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes paid by the government are merely the taxes or retribution for its activities in the real estate sector and taxes on the commodities produced. The government does not receive any subsidy. Data on tax payments by the government are not yet available so that this item is left blank.

https://www.bps.go.id

2.2.1.5 Produksi yang Dikonsumsi Sendiri

Mengingat keluaran/output sektor pemerintah umum tidak dapat dinilai secara langsung, maka nilai **produksi yang dikonsumsi sendiri (output non pasar)** dijadikan residual dan nilainya diperoleh dengan mengurangkan total input pemerintah umum di sebelah kiri dengan penerimaan dari jasa dan hasil produksi berupa barang yang dihasilkan.

2.2.1.5 Services Produced for Own Consumption

As mentioned that the output of general government can not be valued using market prices so that the production value for own consumption is estimated by subtracting the values of commodities produced and non- commodity sales from the total expenditure of general government.

2.2.1.6 Penerimaan dari Jasa

Yang dimaksud dengan penerimaan dari jasa adalah penerimaan pemerintah umum dari kegiatan jasa yang disediakan untuk masyarakat. Rincian ini mencakup:

1. Penerimaan pendidikan yaitu penerimaan pemerintah umum yang bersumber dari hasil kegiatan sekolah-sekolah negeri seperti uang pendidikan, uang ujian sekolah, uang pendaftaran, dan uang ujian menjalankan praktik dan uang pendidikan lainnya,
2. Pendapatan/penerimaan dari jasa I yang terdiri dari:
   a. Penerimaan dari rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya yang diusahakan oleh pemerintah umum,
   b. Penjualan karcis dan biaya masuk ke tempat-tempat hiburan yang diusahakan oleh pemerintah umum,
   c. Penerimaan jasa tenaga kerja dan pekerjaan,

2.2.1.6 Non-commodity Sales

Revenue from non-commodity sales is defined as general government revenues from service activities provided to the public. This item covers

1. *Educational revenues i.e., general government revenues from the operation of public schools such as tuition fees, examination fees, registration fees, and fees for practical examination work,*
2. *Revenues from type-I services comprice of*
   a. *Hospitals, clinics, and other health institutions owned by the general government,*
   b. *Ticket sales to general government-run recreation areas,*
   c. *Service charges for completed work by general government workers,*

https://www.bps.go.id

d. Penerimaan dari pengurusan surat keterangan,
e. Penerimaan dari jasa pertanahan,
f. Penerimaan dari hak perizinan,
g. Penerimaan dari sensor/pemeriksaan,
i. Penerimaan dari jasa bandara/ pelabuhan laut,

3. 50 persen sewa, penggantian benda-benda tak bergerak seperti rumah dinas, rumah negara, benda-benda bergerak, seperti alat-alat besar dan sebagainya dan benda tak bergerak lainnya,
4. 50 persen penerimaan bukan pajak (PNBP) dari luar negeri, dan
5. 20 persen penerimaan lain-lain pada PNBP lainnya.

Sedangkan untuk pemerintah daerah berasal dari penerimaan lain-lain dari PAD yang sah.

2.2.1.7 Produksi Berupa Barang

Rincian produksi berupa barang ini adalah penjualan dari barang-barang yang diproduksi oleh semua unit-unit pemerintahan umum. Umumnya barang-barang tersebut merupakan produksi sambilan dari kegiatan sektor pemerintah umum yang baik keuangan maupun kegiatan proses produksinya tidak dapat dipisahkan dari organisasi induknya. Barang-barang yang dihasilkan itu umumnya diproduksi juga oleh perusahaan-

d. Receives from Project-related revenues,
e. Others government's administrative services

3. 50 percent of revenues from rents and income for the use of fixed capital such as official housing, government dwellings, and mobile capitals such as heavy equipment etc,
4. 50 percent of non-tax revenues from abroad, and
5. 20 percent of the item "other" in the central government revenue list.

Meanwhile, non-comodities sales in local government revenues are derived from other revenues in the Original Local Revenues.

2.2.1.7 Commodities Produced

This revenue category comprises of sales of all commodities produced by all general government units. In general, these commodities are produced as secondary government activities in which the production process and the financial transactions cannot be separated from those of primary activities. Similar commodities may also be produced by the private business sector and are sold in the market at virtually the same price levels.

https://www.bps.go.id

perusahaan lain dan dijual dengan harga yang sama dengan barang-barang serupa yang ada di pasar.

Barang-barang hasil produksi pemerintah pusat adalah:

1. Penjualan hasil produksi/sitaan yang terdiri dar:
   a. Penjualan hasil pertanian/perkebunan,
   b. Penjualan hasil peternakan,
   c. Penjualan hasil pertambangan,
   d. Penjualan hasil penangkapan perikanan,
   e. Penjualan informasi, penerbitan, potret, film, poster, gambar dan peta,
   f. Penjualan obat-obatan/farmasi, vaksinasi, dan hasil farmasi lainnya,
   g. Penjualan dokumen pelelangan,
2. 50 persen pendapatan/penerimaan dari sewa, benda-benda tak bergerak seperti rumah dinas, rumah negara, benda-benda bergerak, seperti alat-alat besar dan sebagainya dan benda tak bergerak lainnya,
3. 20 persen penerimaan lain-lain pada PNBP lainnya.

Sedangkan untuk pemerintah daerah, produksi berupa barang ini merupakan bagian dari penerimaan lain-lain PAD yang sah.

This general government revenue item comprises of revenues from

1. *Sales of product which covers*
   a. Sales of agricultural products,
   b. Sales of livestock products,
   c. Sales of mining product,
   d. Sales of fisheries products,
   e. Sales of printing products, photos, films, posters, pictures, and maps,
   f. Sales of medicine, vaccines, and other pharmaceutical products, and
   g. Receipts from registration of tenders,
2. *50 percent of revenue from rents and income for fixed capital using such as official housing, government dwellings, and mobile capitals such as heavy equipment etc, and other fixed assets, and*
3. *20 percent of other revenues in other non-tax revenues.*

On ther other hands, commodities produced in local government comprises of other revenues in the Original Local Revenues

https://www.bps.go.id

Penerimaan dari jasa dan produksi barang dari pemerintah umum ini disebut juga dengan istilah output pasar dari pemerintah umum. Jika rincian 2.2.1.5 hingga rincian 2.2.1.7 dijumlahkan, maka diperoleh total output/keluaran (total produksi) pemerintahan umum.

Revenues from non-commodities sales and commodities produced are referred as a market output of general government. Furthermore, the total output of general government is taken by summing up 2.2.1.5 to 2.2.1.7 component.

2.2.2 Neraca Penerimaan dan Pengeluaran

Neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintahan umum menyajikan semua transaksi selain transaksi yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan akumulasi modal. Transaksi yang dilakukan oleh pemerintah umum mencakup transaksi antar pemerintah umum sendiri, transaksi pemerintah umum dengan swasta, transaksi pemerintah umum dengan badan-badan usaha negara, transaksi pemerintah umum dengan rumah tangga, dan transaksi pemerintah umum dengan luar negeri.

2.2.2 Income and Outlay Accounts

The general government's income and outlay accounts delineate the general government's current revenues and disbursements in which the transations are not dealing with production activities. The transactions involved include those made between levels of general government and those between the general government and private sectors, public enterprises, households, and the rest of the world.

Sisi kanan memuat penerimaan yang terdiri dari laba bersih, penerimaan dari harta, pajak tak langsung, pajak langsung, pungutan-pungutan dan denda-denda, imputasi kesejahteraan pegawai, dan transfer lancar. Sedangkan sisi kiri memuat pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran konsumsi, pembayaran bunga, pemberian subsidi, bantuan sosial, imputasi kesejahteraan pegawai, transfer lancar yang berupa bantuan pemerintah umum kepada

The entries recorded on the right-hand side of the income and outlay account are operating surplus, property income receipts, direct taxes, indirect taxes and other receipts. Meanwhile, the left-hand side of the account records expenditure made by the general government which is broken down into general government final consumption expenditure, interest paid, subsidies, social assistance grants, general government transfers and savings which is

https://www.bps.go.id

pihak lain, dan tabungan. Sebagai faktor penyeimbang dalam neraca penerimaan dan pengeluaran ini adalah tabungan. Berikut dijelaskan rincian-rincian yang terdapat pada neraca ini.

used as balancing item of the account. Following sections describe definition of components used in the account.

2.2.2.1 Laba Bersih

Laba bersih adalah keuntungan bersih unit usaha yang berada di lembaga/departemen (*departemental enterprises*) baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diserahkan kepada pemerintah umum. Tetapi karena unit usaha semacam ini, misalnya percetakan yang berada di lembaga/departemen/dinas pemerintah umum, pembukuannya tidak bisa dipisahkan dengan pembukuan pemerintah umum maka unit usaha tersebut dianggap menyatu dengan pemerintah umum, sehingga nilai laba bersih dianggap sama dengan nol.

2.2.2.1 Operating Surplus

Operating surplus is the net profit of the departmental enterprises wheather located in central or local which deliver to the general government. Due to the fact that such enterprises, i.e., printing department in the governmental department, could not have a separate accounting records from the general government's accounting system, so those enterprises are considered as a governmental department as a whole, and then the operating surplus is estimated to be zero.

2.2.2.2 Pendapatan Kekayaan

Pendapatan kekayaan adalah pendapatan pemerintah umum yang berasal dari kekayaan yang dimiliki pemerintah umum seperti (1) bunga, (2) laba saham, dan (3) sewa tanah dan royalti. Dalam hal tanah bengkok, perlakuannya tetap dimasukkan pada rincian ini tanpa memandang apakah tanah tersebut dikerjakan sendiri atau disewakan pada pihak lain.

2.2.2.2 Property Income

Property income is revenues for the use of general government-owned properties which may be classified into three categories namely, (1) interest, (2) dividends and (3) net rents and royalties. In the case of tanah bengkok (village-owned land, which is used as salary for village's officers), the income is counted as property income no matter the properties are rented out or the properties are used by others

https://www.bps.go.id

Yang dicakup dalam pendapatan kekayaan adalah :

1. Pendapatan bunga atas investasi dalam negeri dan obligasi,
2. Laba saham dari badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/D),
3. Pendapatan sewa tanah dan royalty yang terdiri dari:
   a. Penerimaan dari minyak bumi
   b. Penerimaan dari gas alam
   c. Penerimaan dari pertambangan umum (iuran tetap dan royalti)
   d. Penerimaan dari kehutanan (dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dana pengamanan hutan, denda pelanggan eksploitasi hutan dan iuran menangkap satwa liar)
   e. Penerimaan dari perikanan (pendapatan perikanan dan dana kompensasi pelestarian SDA kelautan).

sectors based on a contract share basis. Items included in property income are:

1. *Interest revenues over domestic investments and obligations,*
2. *Dividens from state and local-owned enterprises*
3. *Land rent and royalties which comprise of*
   a. Oil revenues
   b. Natural gas revenues
   c. Mining revenues (landrent and royalty)
   d. Forestry revenues (reforestry fund, forest provision fee, forest exploitation,
   e. Fishery revenues (duties on fishery businesses, fish production proceeds fees, and ocean conservation compensation fund)

2.2.2.3 Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah umum melalui konsumen berkenaan dengan barang dan jasa yang diproduksi, dijual, dikirim, atau digunakan. Umumnya pajak tak langsung tersebut dibebankan pada biaya produksi dari barang dan jasa yang bersangkutan.

2.2.2.3 Indirect Taxes

Indirect taxes are those levied on the production, sale, purchase or use of goods and services by businesses and are usually considered as costs of production.

https://www.bps.go.id

Pajak tak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Pajak perdagangan internasional yang terdiri dari
   a. Bea masuk dan
   b. Pajak/pungutan ekspor,
2. Pajak barang-barang produksi dalam negeri yang terdiri dari
   a. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan (PPn), yang mencakup (i) PPN barang-barang dalam negeri, (ii) PPN barang-barang impor, (iii) PPn barang mewah (BM) dalam negeri, (iv) PPnBM luar negeri, dan (v) PPN dan PPnBM lainnya dan
   b. Cukai (tembakau, *ethyl* alkohol dan minuman mengandung alkohol lainnya, dan
3. Pajak tak langsung lainnya yang mencakup:
   a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu masing-masing dari PBB Perkebunan, kehutanan dan pertambangan, setengah (50 persen) dari PBB Pedesaan, perkotaan dan PBB lainnya serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
   b. Bea Meterai
   c. Bunga tagihan PPN, PPnBM dan pajak tak langsung lainnya,

Three main categories of indirect taxes are distinguished in the account, i.e.:

1. *International trade taxes which comprises of*
   a. *Import duties and*
   b. *Export tax*
2. *Taxes on domestic goods and services which comprises of*
   a. *Value-added tax and sales tax that covers (i) value-added tax of domestic goods, (ii) value-added tax of imported goods, (iii) sales tax of domestic luxury goods, (iv) sales tax of foreign luxury goods, and (v) others,*
   b. *Excise duties (tobacco, ethyl alcohol, and alcoholic drinks)*
3. *Other indirect taxes which consists of*
   a. *Land and Building Tax which comprises of agriculture, forestry, and mining land and building tax, 50 percent of rural land and building tax, and other land and building tax, and duties on land and building,*
   b. *Stamp tax,*
   c. *Interest on claim for value-added tax and sales tax on luxury goods,*

https://www.bps.go.id

d. Penjualan materai PT Pos Indonesia
e. Pajak tak Langsung lainnya.

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, pajak tak langsung ini terdiri dari

1. 50 persen pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
2. 50 persen bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
3. 50 persen pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
5. 50 persen pajak hotel,
6. 50 persen pajak restoran,
7. Pajak hiburan,
8. Pajak reklame,
9. 50 persen pajak penerangan jalan,
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan
11. Pajak parkir.

2.2.2.4 Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pungutan pemerintah umum yang berkenaan dengan pendapatan bersih dari seseorang atau perusahaan seperti pajak penghasilan perseroan, yaitu pungutan pemerintah umum atas keuntungan perusahaan yang disetor ke kas negara secara teratur.

Pajak langsung pemerintah pusat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

d. Stamp sales, and
e. Others.

In addition to the central government, local government's indirect taxes cover

1. *50 percent of taxes on motorized vehicles and vehicles running on water*
2. *50 percent of name-change fees for motorized vehicles and vehicles running on water*
3. *50 percent of tax on motorized vehicle fuel,*
4. *Tax on the collection and utilization of underground water and surface water,*
5. *50 percent of hotel tax,*
6. *50 percent of restaurant tax,*
7. *Entertainment tax,*
8. *Advertisement tax,*
9. *50 percent of road illumination tax,*
10. *Tax on the mining of C-category mined substances (minerals), and*
11. *Parking tax.*

2.2.2.4 Direct Taxes

Direct taxes are those levies imposed at regular intervals by general government on personal's or corporate's income such as corporate income tax which is defined as tax on corporate profits.

There are three categories direct tax in central government:

https://www.bps.go.id

1. Pajak penghasilan (PPh) perseroan minyak dan gas (migas) yang terdiri dari PPh minyak bumi dan PPh gas alam,
2. PPh perseroan non-migas, yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22 (PPh pasal 22 non impor dan PPh pasal 22 impor), PPh pasal 23, PPh pasal 25/29 (PPh pasal 25/29 pribadi, PPh pasal 25/29 badan), PPh pasal 26 dan PPh final dan fiskal luar negeri, dan
3. Pajak langsung lainnya yang terdiri dari:
   a. 50 persen dari PBB pedesaan, perkotaan dan PBB lainnya,
   b. 50 persen BPHTB, dan
   c. Bunga tagihan PPh.

Sedangkan pajak langsung lainnya pemerintah daerah dibedakan menurut kategori pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Pajak ini terdiri dari:

a. 50 persen pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
b. 50 persen bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
c. 50 persen pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
d. 50 persen pajak hotel,
e. 50 persen pajak restoran, dan
f. 50 persen pajak penerangan jalan

1. Oil income taxes which cover oil corporation income tax and gas corporation income tax,
2. Non-oil income taxes which comprise of article 21, article 22 (local and imported), article 23, article 25/29 (corporate and personal), article 26, and Final income tax and exit payment, and
3. Other direct taxes include:
   a. 50 percent of rural, urban, and other land and building tax
   b. 50 percent of duties on land and building, and
   c. Interest on income tax claim.

In addition to central government direct taxes, local government direct taxes cover:

a. 50 percent of taxes on motorized vehicles and vehicles running on water
b. 50 percent of name-change fees for motorized vehicles and vehicles running on water
c. 50 percent of tax on motorized vehicle fuel,
d. 50 percent of hotel tax,
e. 50 percent of restaurant tax, and
f. 50 percent of road illumination tax,

https://www.bps.go.id

2.2.2.5 Pungutan dan Denda

Nilai rincian pungutan dan denda ini adalah penerimaan pemerintah umum sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan/disediakan oleh pemerintah umum untuk kepentingan masyarakat. Rincian ini mencakup pendapatan dari Jasa II, pendapatan kejaksaan dan peradilan, 50 persen pendapatan dari bukan pajak luar negeri luar negeri dan 20 persen penerimaan bukan pajak lainnya.

Sementara itu, pendapatan dari jasa II terdiri dari (1) Penerimaan dari jasa lembaga keuangan (jasa giro dan rekening pemerintah), (2) Penerimaan iuran jasa penyelenggaraan lelang, (3) Penerimaan iuran lelang fakir miskin, (4) Penerimaan jasa dalam urusan catatan sipil (nikah, talak, rujuk dan akte kelahiran), (5) Penerimaan dan pendapatan penagihan pajak, (6) Uang pewarganegaraan, (7) Pendapatan biaya lelang, (8) Pendapatan biaya penagihan piutang dan (9) Pendapatan jasa lainnya.

Sedangkan pendapatan dari kejaksaan dan peradilan terdiri dari (1) Uang legalisasi tanda tangan oleh menterikehakiman dan HAM, (2) Pengesahan uang di bawah tangan, (3) Uang meja (leges) dan upah pada panitera bidang usaha, (4) Hasil denda tilang, (5) Ongkos perkara, dan (6) Lain-lain penerimaan kejaksaan dan peradilan.

2.2.2.5 Compulsory Fees, Fines, and Penalties

This is payment made by households with respect to services and facilities provided by the general government. This item comprises of type II services revenues, ministry of justice revenues, 50 percent foreign non-tax revenues, and 20 percent other non-tax revenues.

Furthermore, type II services revenues cover (1) financial services charge from financial institutions, (2) auction, (3) marriage, divorce and remarriage service fees, (4) charges for services of a regulatory character such as fees for visas, passports, license fees for registration of land and others,and (5) others.

Meanwhile, ministry of justice revenues cover (1) fee for signature legalization, (2) private letters legalization, (3) fees and wages of court business clerk,(4) penalties, (5) other incomes from courts and justice system, and (6) others.

https://www.bps.go.id

Pungutan dan denda bagi pemerintah daerah merupakan bagian dari lan-lain pendapatan daerah yang sah.

In addition, compulsory fees, fines, and penalties in local government is estimated using other regional revenues.

2.2.2.6 Imputasi Kesejahteraan Pegawai

Yang dicakup dalam rincian ini adalah sumbangan/kontribusi kesejahtera-an pegawai yang sebenarnya termasuk dalam upah dan gaji. Nilai ini merupakan kewajiban majikan (pemerintah umum) untuk membayar pegawainya, seperti pensiun, tunjangan kesejahteraan keluarga, uang pesangon dan kesejahteraan pegawai lainnya, yang pembayarannya tidak dilakukan melalui suatu dana khusus atau dananya diperkirakan sama dengan pengeluaran pemerintah umum untuk pensiun.

2.2.2.6 Unfunded Employee Contribution

Items included in this category are welfare benefits provided by the general government to its employees and their dependents such as pensions, discharge pay, medical care, etc. They are not channelled through a special fund. The various benefits are paid out as a part of wages and salaries on a case by case basis. The imputed value of the category is estimated to be equal to the general government expenditure on pensions.

2.2.2.7 Transfer Lancar ke/dari Pemerintah Umum

Transfer lancar adalah transaksi dana yang dilakukan oleh pemerintah umum untuk keperluan yang bersifat rutin. Dalam hal ini tidak ada barang atau jasa yang diterima sebagai imbalannya sehingga tidak ada kontribusi apapun dalam proses produksi.

Transfer lancar ke pemerintah pusat adalah hibah, sedangkan transfer lancar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang

2.2.2.7 Current Transfer to/from General Government

The transfer items covered here are transaction of funds between the general government and households or between the general government and the rest of the world, which have no reciprocal flow of goods and services to compensate for the fund transacted, so that they do not affect production.

The current transfer to central government is grants while current transfer from central government is balance funds which comprises of

https://www.bps.go.id

mencakup:

1. 80 persen Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari DAU untuk propinsi dan DAU untuk Kabupaten/kota,
2. 80 persen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK reboisasi dan non reboisasi, dan
3. 80 persen Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Penyesuaian.

1. *80 percent of General Allocation Funds for provinces and districts government,*
2. *80 percent of Special Allocation Funds for reforestry and non reforestry funds , and*
3. *80 percent of Adjustment and Special Autonomy Funds.*

2.2.2.8 Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran konsumsi pemerintah umum sama dengan produksi pemerintah umum yang dikonsumsi sendiri (lihat rincian 3 pada neraca produksi) yaitu produksi bruto pemerintah umum dikurangi penerimaan dari produksi berupa barang dan jasa yang diberikan.

2.2.2.8 Final Consumption Expenditure

This flow is equivalent to the value of goods and services produced for own consumption in current account (component 3 of production accounts), which is the value of gross output less sales of commodities and non-commodities produced.

2.2.2.9 Pengeluaran Kekayaan

Pengeluaran kekayaan ini mencakup pembayaran bunga hutang luar negeri dan bunga hutang dalam negeri.

2.2.2.9 Property Income Paid

Included here is the payment of interest on foreign and domestic debts.

2.2.2.10 Subsidi

Subsidi mencakup semua bantuan baik dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan oleh pemerintah umum pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan subsidi

2.2.2.10 Subsidies

Subsidies includes all general government grants, in cash or in kind, given to private and public enterprises in order to maintaining prices level, covering for operating losses, etc. Meanwhile, subsidies in kind are those used as intermediate goods, so that grants in the form of capital goods or in the form of cash are not

https://www.bps.go.id

dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Subsidi ini mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi non BBM (subsidi pangan, listrik, benih, obat, bunga kredit program, pupuk dan lain-lain).

included. The subsidies cover oil subsidies and non-oil subsidies such as foods, electricity, seeds, medicines, credits' interest programs, fertilizers, and others.

2.2.2.11 Bantuan Sosial

Bantuam sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah umum kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah umum kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

2.2.2.11 Social Assistance Grants

This category of transfer includes all general government grants given directly to individuals or households. It includes grants made by general government on account of disasters, warfare, and scholarships for individuals.

https://www.bps.go.id

2.2.2.12 Tabungan

Rincian tabungan ini merupakan faktor penyeimbang di dalam neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintah umum, yaitu selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.

2.2.2.12 Savings

This item is defined as a balancing item in the income and outlay account, i.e., the discrepancy between receipts and disbursements.

2.2.3 Neraca Modal

Neraca modal pemerintahan umum adalah neraca yang memperlihatkan transaksi modal dan pembiayaannya, antara pemerintah dan badan-badan lain (termasuk luar negeri).

2.2.3 Capital Account

The capital account of general government is an account showing general government transactions concerning capital formation with other sectors and the rest of the world.

Sisi kiri neraca mencakup pembentukan modal yang terdiri dari perubahan stok, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pembelian tanah neto, pembelian barang-barang modal yang tidak berwujud dan transfer modal ke sektor lain atau ke luar negeri. Sedangkan sisi kanan mencakup sumber dana yang dipakai untuk pembelian barang-barang modal yang tercatat di sisi kiri tersebut, yang antara lain berasal dari tabungan, penyusutan barang modal, transfer modal, dan pinjaman neto. Rincian terakhir ini digunakan sebagai faktor penyeimbang pada neraca modal. Berikut dijelaskan rincian-rincian yang terdapat pada neraca modal ini.

The left side of the account records the value of capital goods categories, namely, increase in stocks, gross fixed capital formation, purchases of land, purchases of intangible goods and capital transfer to other sectors or the rest of the world. While the right side of the account records fund sources used to finance the capital goods appearing on the left side of the account. This side consists of savings, allowance for the consumption of capital goods, and net capital transfers and loans. The last item in the account is net lending/net borrowing as balancing item. Description of each component is explained as follow.

2.2.3.1 Perubahan Stok

Stok terdiri dari bermacam-macam barang yang akan dipakai, yang sedang dalam proses pengerjaan dan barang-barang yang sudah jadi tapi belum dijual. Dengan demikian pemegang stok sebagian besar adalah perusahaan, termasuk perusahaan pemerintah dan pemerintah sendiri. Stok pemerintah umum merupakan persediaan barang-barang strategis seperti bahan pangan. Nilai perubahan stok pada tahun tertentu adalah selisih antara nilai stok akhir tahun dengan nilai stok awal tahun. Mengingat data stok barang-barang strategis pemerintah umum belum tersedia maka perubahan stok bernilai nol.

2.2.3.1 Changes in Stocks

Stock may consist of intermediate goods to be used in the production process, unfinished goods and unsold finished goods. Therefore, the stock holders are business enterprises, state and local enterprises, and government. Goods categorized as general government stock are those held for strategic purposes such as foodstuffs. Changes in stocks in a particular year are defined as the difference between the closing year's stock and opening year's stock. However, such data on strategic goods are not yet available; as a result, data on general government's changes in stock are left unfilled.

https://www.bps.go.id

2.2.3.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB adalah pengeluaran pemerintah umum untuk pengadaan barang modal dikurangi penjualan dari barang-barang modal bekas. Barang modal pemerintah umum terdiri dari:

1. Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal,
2. Jalan, jembatan, dan konstruksi lainnya,
3. Mesin-mesin dan peralatan,
4. Kendaraan,
5. Perbaikan besar dan perluasan dari barang-barang modal yang telah disebutkan, dan
6. Pengeluaran dalam rangka perluasan areal pemukiman dan perkebunan serta pembelian ternak untuk dikembangbiakkan, kecuali ternak potong.

2.2.3.2 Gross Fixed Capital Formation (GFCF)

Gross fixed capital formation in the general government sector is defined as the difference between general government expenditure on additions to its fixed assets and net sales of similar second-hand and scrapped goods. Items classified as fixed capital formation in this sector, according to the SNA manual, are:

1. *Dwelling and non-dwelling buildings,*
2. *Road, bridge and similar constructions,*
3. *Machineries and equipments,*
4. *Motor vehicles,*
5. *Major repair and alteration of the above durable goods which significantly extend their lifetime or productivity, and*
6. *Outlays on the reclamation and improvement of land and the development of plantations.*

2.2.3.3 Pembelian Tanah

Pemerintah umum sering melakukan transaksi jual beli tanah baik jual beli antar instansi pemerintah umum maupun jual beli dengan swasta, seperti pemerintah umum memerlukan tanah untuk keperluan pangkalan militer, untuk daerah pemukiman, atau untuk pembangunan industri. Pengeluaran ini seharusnya dipisahkan dari PMTB karena menyangkut barang modal yang tidak dapat direproduksi. Namun, mengingat data

2.2.3.3 Purchases of Land

General government agencies are often involved in land transactions, either within government units or between the general government and private sectors, for instance, when the general government needs land for military installations, or for settlement of industrial development. This expenditure should not be included in gross fixed capital formation, because it involves non-reproducible capital goods. However, since the actual figures could not be

https://www.bps.go.id

pembelian tanah oleh pemerintah daerah masih tergabung dalam belanja modal lainnya, dan tidak dapat dipisahkan, maka nilai pembelian tanah pemerintahah umum masih tergabung dalam PMTB. Apabila datanya memungkinkan, maka transaksi pembelian tanah akan dicatat secara terpisah dan nilai yang dicatat merupakan nilai transaksi neto (selisih pembelian dan penjualan).

separated out from local government's capital expenditures, they are still included in the gross fixed capital formation figure. This treatment will be corrected when appropriate data are available.

2.2.3.4 Pembelian Barang Modal yang Tak Berwujud

Pembelian barang modal yang tidak berwujud mencakup hak pengusahaan sumber alam, areal perikanan, konsesi, hak paten dan merk dagang. Nilai transaksi yang dicatat adalah nilai transaksi neto yaitu pembelian dikurangi penjualan. Namun, data pembelian dan penjualan barang modal tak berwujud ini tidak dapat dipisahkan dari pengeluaran lainnya sehingga di dalam neraca modal nilainya masih tergabung di dalam PMTB.

2.2.3.4 Purchases of Intangible Assets

Included in this category are purchases of capital goods such as natural resource concessions, fishing areas, patents, and trade marks. The transaction figure presented should be a net figure, i.e., purchases less sales. However, data on purchases and sales of intangible goods can not be separated out from the other capital expenditure, so that the figure for this item does not appear separately in the account.

2.2.3.5 Transfer Modal yang Diterima dan yang Dikeluarkan

Transfer modal adalah transfer yang pelaksanaannya bisa sekaligus atau tidak beraturan, tetapi pada prinsipnya transfer modal tidak dipertimbangkan oleh pihak penerima sebagai menambah penerimaan lancarnya serta tidak dipertimbangkan oleh

2.2.3.5 Capital Transfer Received and Capital Transfer Paid

Capital transfers are defined as non-current unrequited transfers which are not in general considered by the recipient as adding to his current income or by the payer as reducing his current income.

https://www.bps.go.id

pembayar sebagai mengurangi pendapatan lancarnya.

Dalam praktiknya, transfer terdiri dari transfer modal dan transfer yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rutin. Penentuan jenis transfer ini didasarkan pada anggapan masing-masing pemberi dan penerima. Jika salah satu pihak memperlakukan transfer tersebut sebagai transfer modal, maka dalam klasifikasinya harus dimasukkan sebagai transfer modal. Transfer modal ini terjadi antara tingkat pemerintahan, pemerintah dengan luar negeri dan dapat juga antara pemerintah dengan swasta.

Macam-macam transfer modal adalah sebagai berikut :

1. Transfer modal dari dalam negeri seperti PBB. Besarnya PBB yang dikeluarkan pemerintah pusat dianggap sama dengan jumlah PBB yang diterima pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Data diperoleh dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok penerimaan dan dari Realisasi Penerimaan APBD propinsi dan kabupaten/kota.
2. Transfer modal dari luar negeri, yaitu berupa hibah. Datanya diperoleh dari

In practice, it is sometimes difficult to distinguish between a current transfer and a capital transfer. One party may regard a transfer as current while the other regards it as a capital transfer. Deciding whether the transfer is capital or current transfer is based on the assumption used by the party. If one party considers the transfer as capital transfer, so the transfer must be considered as capital transfer by other party. Capital transfers may take place between levels of government, between general governments and the rest of the world, between general government and private sectors, etc.

The types of capital transfer are as follow.

1. *Domestic capital transfers such as tax on land and building (PBB). The amount of PBB paid by the central government is assumed to be equal to the total amount received by provincial governments, regency governments, and village governments. The data on the amount received by regional government are obtained from the incoming side of the local governments budget,*
2. *Capital transfer from the rest of the world is in term of grants. The data is*

https://www.bps.go.id

pendapatan negara dan hibah berupa pendapatan hibah (dalam negeri dan luar negeri),

3. Transfer modal ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, adalah Dana Perimbangan untuk pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan desa, berupa dana bagi hasil yang terdiri dari:
   a. Bagi hasil (perpajakan dan SDA untuk propinsi dan kabupaten/kota),
   b. 20 persen DAU dan DAK,
   c. 20 persen DOK dan penyeimbang.

taken from grants in the government budget (domestic and foreign).

3. Capital transfer to local governments covers balance funds for provinces, regencies, and villages government which consists of
   a. Revenue sharing (taxes and natural resources)
   b. 20 percent of general allocation fund and special allocation fund
   c. *20 percent of adjustment and special autonomy funds.*

2.2.3.6 Tabungan

Tabungan adalah faktor penyeimbang pada neraca penerimaan dan pengeluaran, yang kemudian dipindahkan ke neraca modal sebagai sumber pembiayaan.

2.2.3.6 Savings

Savings which is the balancing item in the income and outlay account is a source of funds in the capital account.

https://www.bps.go.id

2.2.3.7 Penyusutan Barang Modal

Rincian penyusutan barang modal ini sama dengan rincian penyusutan dalam neraca produksi. Pada neraca modal, rincian ini menjadi salah satu sumber pembiayaan barang modal.

2.2.3.7 Depreciation

This item which is the same with that in the expenditure side of the production account is a source of fund for financing the purchase of capital goods in the capital account.

2.2.3.8 Pinjaman Neto

Rincian pinjaman neto ini adalah faktor penyeimbang dalam neraca modal pemerintah umum, yaitu selisih antara

2.2.3.8. Net Borrowing

This is the balancing item in the capital account.

jumlah pembentukan modal dengan jumlah pembiayaan modal.

Penyusunan ketiga macam neraca di atas diperlukan karena dalam analisis ekonomi makro sering dikaitkan antara produksi dengan pengeluaran untuk konsumsi serta pengeluaran untuk investasi. Seperti telah diterangkan sebelumnya, ada satu komponen di satu neraca yang merupakan komponen juga di neraca yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga neraca tersebut saling berkaitan. Untuk menggambarkan keterkaitan antara ketiga jenis neraca pemerintahan umum tersebut, berikut diberikan bentuk sederhana dari ketiga neraca tersebut dalam bentuk diagram. Nomor yang terletak pada akhir rincian menunjukkan bahwa rincian tersebut muncul kembali pada neraca lain dengan menggunakan nomor tersebut.

Seperti terlihat pada diagram, rincian produksi yang dikonsumsi sendiri (rincian 3 pada sisi kanan neraca produksi) yang merupakan faktor penyeimbang, muncul kembali pada sisi kiri neraca penerimaan dan pengeluaran (rincian 5). Demikian pula dengan rincian penyusutan barang modal (rincian 2 di sisi kiri neraca produksi) muncul kembali sebagai sumber dana pembentukan modal (rincian 11 pada neraca modal. Selanjutnya, tabungan (rincian 6 pada sisi kiri neraca penerimaan

Estimating these three accounts is usefull in analyzing of macro economic to describe interdependency among production and consumption expenditure and investment. As mentioned in the previous section, there is one component in account which appears again in the other account. Therefore, we can say that the three accounts are interrelated each other. To describing the interrelation among the accounts, we deliver the diagram of general government accounts in a simple form. In the diagram, the number shown at the end of component indicates that the same component reappear at the other account using that number.

As shown in the diagram, production for own consumption (component no 3 at right-side of production account) as balancing item reappear at the left-side of income and outlay account (component no 5). The same treatment also applied for allowances for capital depreciation (component no 2 at the left-side of production account) which reappear as source of funds for capital formation (component no 11 in the capital account). Furthermore, savings (component no 6 at

https://www.bps.go.id

dan pengeluaran) yang merupakan rincian penyeimbang dalam neraca tersebut muncul kembali di sisi kanan neraca modal sebagai sumber dana pembentukan modal (rincian 12).

the left-side of income and outlay account) as balancing item reappear at the right-side of capital account as source of funds for capital formation.

https://www.bps.go.id

Diagram : 2.1 Neraca Produksi Pemerintahan Umum/ *General Government's Production Account*

1. Belanja barang dan belanja pegawai / *Material expenditure and compensation of employees* **2. Penyusutan Barang Modal / *Consumption of fixed Capital* (11)**	**3. Produksi yang dikonsumsi sendiri / *Production for own consumption* (5)** 4. Penerimaan dari jasa dan produksi barang / *Non commodities sales and commodities produced*
Jumlah biaya / *Total Input*	Jumlah produksi / *Total Output*

Diagram : 2.2 Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Umum / *General Government's Income and Outlay Account*

5. Pengeluaran konsumsi / *Final consumption expenditure* (3) **6. Tabungan / *Savings* (12)**	7. Pajak dan lain-lain / *Taxes and other revenues* 8. Transfer (neto) / *Net transfer*
Jumlah pengeluaran / *Total Disbursement*	Jumlah penerimaan / *Total Revenues*

Diagram : 2.3 Neraca Modal Pemerintahan Umum / *General Government's Capital Accounts*

9. Perubahan Stok / *Increase in stock* 10. Pembentukan modal tetap bruto/ *Gross Fixed Capital Formation*	***11.*** **Penyusutan Barang Modal / *Consumption of fixed Capital* (2)** **12. Tabungan / *Savings* (6)**
Jumlah pembentukan modal / *Total Capital Formation*	Jumlah pembiayaan modal / *Total Finance of acumulation*

https://www.bps.go.id

III ANALISIS DESKRIPTIF KOMPONEN NERACA PEMERINTAHAN UMUM *2003-2008/DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE ACCOUNTS' COMPONENTS 2003-2008*

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, neraca sektor pemerintahan umum terdiri dari tiga neraca, yaitu neraca produksi, neraca penerimaan dan pengeluaran, dan neraca kapital. Dimana pada setiap neraca tersebut terdiri dari beberapa komponen.

Berbagai macam analisis dapat dilakukan atas komponen-komponen neraca tersebut. Jika neraca tersedia dalam harga konstan, maka komponen-komponen neraca tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis secara deret waktu. Namun, dalam publikasi ini neraca pemerintahan umum yang disajikan hanya mencakup transaksi-transaksi yang diukur atas dasar harga yang berlaku. Oleh karena itu data yang disajikan dalam neraca-neraca ini dianalisis secara vertikal, seperti analisis perbandingan relatif antara satu komponen dengan komponen lainnya dan melihat perkembangannya dari tahun ke tahun.

Dengan demikian dapat dilihat perkembangan besaran-besaran transaksi dalam neraca-neraca tersebut dalam bentuk persentase dari tahun 2003 sampai

As we discussed in the previous chapter, general government accounts consist of production, income and outlay, and capital account and each accounts covers several components.

Various kinds of analysis can be performed using data on each component in the accounts. Trend analysis and others which require time-series data can be performed only if the data is available in constant price. Since general government accounts cover transactions measured in current prices only, the kind of analysis attempted here is only what may be termed as a vertical analysis in which we try to compare the relative magnitudes of the components of the accounts and how they change in time.

In this way we observe how these magnitudes developed, although only in percentage forms, over the years covered by this publication i.e., 2003 through 2008.

https://www.bps.go.id

dengan tahun 2008. Berdasarkan rasio-rasio yang diperoleh terlihat secara relatif bagaimana arah dan fluktuasi berbagai komponen yang terdapat dalam keuangan pemerintah umum, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan.

Bab ini menyajikan berbagai rasio yang diharapkan dapat dipandang sebagai indikator-indikator yang berguna, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Ada tujuh komponen dari neraca-neraca ini yang penting untuk diamati geraknya, yaitu **belanja barang**, **belanja pegawai**, **pengeluaran konsumsi**, **tabungan bruto** (tabungan+ penyusutan), **PMTB**, **subsidi** serta penerimaan dari **pajak**

Di samping itu pada ketujuh komponen ini juga akan dilihat posisi dan perkembangannya di masing-masing tingkat pemerintahan , yaitu pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa.

Untuk keperluan ini, Tabel 3.1 dan Grafik 3.1 menyajikan data yang dimaksud untuk masing-masing komponen yang akan dianalisis. Disamping itu, dalam melakukan analisis setiap komponen menurut tingkat pemerintahan, disajikan pula tabel dan grafik secara terpisah.

Berikut dijelaskan hasil analisis terhadap setiap komponen.

From the ratios between the various components in the accounts and their year to year variation, one can then examine the relative fluctuations of every important government financial item, whether it is an expenditure or revenue item.

In this chapter, we present some ratios that may be considered as usefull indicators in form of tables and graphs. There are seven components that derived from the accounts, intermediate inputs, personnel expenditures, final consumption expenditures, gross savings (savings plus depreciation), gross fixed capital formation (GFCF), subsidies, and tax revenues.

In addition to the seven indicators, we present the components at all level of governments, central government, provinces government, districts government, and villages government.

For analysis purposes, we present Tabel 3.1 and Graph 3.1 to show the figure of each component. Besides, we also present each component by level of government separately in order to analyze the component more deeply.

In the following section, we explain the analysis result over those components.

https://www.bps.go.id

Tabel : 3.1 Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum
Table *Percentage of General Government Account's Components to the Total General Government's Revenues*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Biaya Antara/ *Intermediate Input*	18,65	18,22	19,50	20,25	20,09	20,21	19,49
2	Belanja Pegawai/ *Personnel Expenditure*	24,49	25,21	22,71	21,85	23,88	21,78	23,32
3	Pengeluaran Konsumsi/ *Final Consumption Expenditure*	44,34	44,13	42,89	42,78	44,09	41,02	43,21
4	Tabungan Bruto/*Gross Savings*	27,18	23,53	20,75	26,89	22,55	22,58	23,91
5	Subsidi/*Subsidies*	11,70	19,74	23,01	15,96	20,08	27,09	19,60
6	Pajak Tak Langsung/ *Indirect Taxes*	34,80	34,19	33,25	30,53	35,08	33,94	33,63
7	Pajak Langsung/*Direct Taxes*	34,49	34,53	37,04	34,65	35,95	35,75	35,40
8	Jumlah Penerimaan Pajak/*Total Tax Revenue*	69,29	68,72	70,30	65,18	71,04	69,70	69,04
9	Jumlah Penerimaan (Miliar Rupiah)/*Total Revenues (Billions Rupiahs)*	369 166	432 897	524 525	673 326	747 921	1 016 234	

*) angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Grafik : 3.1 Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum
Graph *Percentage of General Government Account's Components to the Total General Government's Revenues*

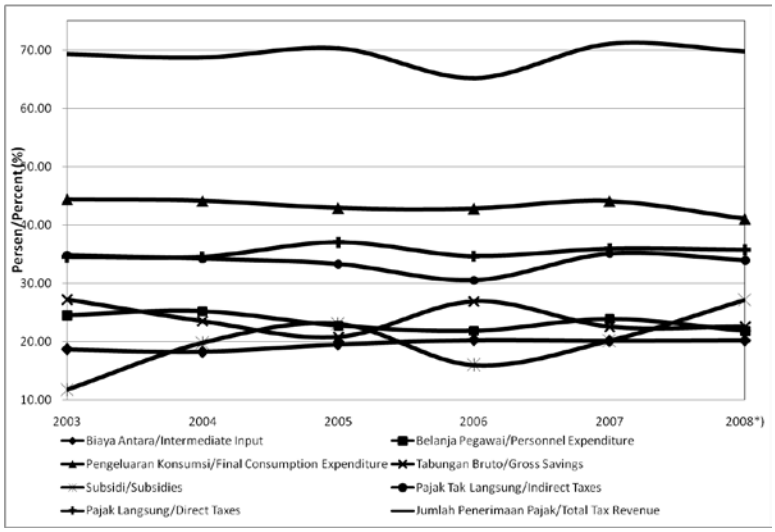

3.1. Biaya Antara

Seperti terlihat pada Tabel 3.1 dan Grafik 3.1, persentase biaya antara terhadap penerimaan pemerintahan umum meningkat selama periode tahun 2003-2008. Namun demikian, pada tahun 2004 dan 2007 porsi ini sedikit mengalami penurunan. Selama periode 2003-2008, persentase biaya antara berkisar antara 18 persen sampai 20 persen. Persentase terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 18,22 persen dan tertinggi tahun 2006 sebesar 20,25 persen. Sedangkan secara rata-rata, persentase biaya antara terhadap total penerimaan adalah 19,49 persen.

Berdasarkan tingkat pemerintahan (Tabel 3.2 dan Grafik 3.2), porsi belanja barang pemerintah pusat menunjukkan peningkatan selama periode 2003-2006 dan terjadi penurunan selama periode 2007-2008. Sebaliknya porsi belanja pemerintah daerah mengalami penurunan selama periode 2003-2006 dan mengalami peningkatan selama periode 2007-2008. Ini menunjukkan bahwa peran belanja pemerintah daerah semakin besar dalam pemerintahan umum. Secara keseluruhan, porsi pemerintah pusat berkisar antara 50,57 dan 70,18 persen dan secara rata-rata porsinya adalah 60,53 persen. Tingginya porsi pemerintah pusat ini menunjukkan

3.1 Intermediate Inputs

Percentage of intermediate input to the total government receives increased during the period 2003-2008, however, in 2004 and 2007 the shares were slightly decreased. During the periode 2003-2008, the percentage was in range 18 to 20 percent and it reached the trough in 2004 and reached the peak in 2006 at 18.22 and 20.25 percent, respectively. On average, during the period, the percentage of intermediate input to the total government receives was 19.49 percent.

Furthermore, by level of government, the share of central government was increasing during period 2003-2006 and conversely, it was decreasing during period 2007-2008 (Table 3.2 and Graph 3.2). In contrast, the share of local government decreasing during the periode 2003-2006 and it was increasing during the period 2007-2008. It shows that local government's intermediate input playing important role in general government's intermediate input. In general, the share of central government was in range 50.57 to 70.18 percent and the average during the period was 60.53 percent. This figure reflects that the central government still has important role in the

https://www.bps.go.id

Tabel / *Table* : 3.2 Proporsi Biaya Antara menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Intermediate Input by Level of Government*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Pemerintahan Umum/ *General Government*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat/ *Central Government*	50,57	50,88	61,35	70,18	66,85	63,35	60,53
3	Pemerintah Provinsi/ *Provinces Government*	14,48	14,66	11,85	9,14	10,21	13,39	12,29
4	Pemerintah Kabupaten/Kota/ *Districts Government*	33,75	32,74	25,47	19,64	21,79	22,09	25,91
5	Pemerintah Desa/ *Villages Government*	1,20	1,72	1,34	1,03	1,15	1,16	1,27
6	Jumlah Biaya Antara (Miliar Rp)/*Total Intermediate Inputs (Billions Rupiahs)*	68 841	78 863	102 279	136 342	150 236	205 402	

*) angka sementara/*preliminary figures*

Grafik / *Graph* : 3.2 Proporsi Biaya Antara menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Intermediate Input by Level of Government*

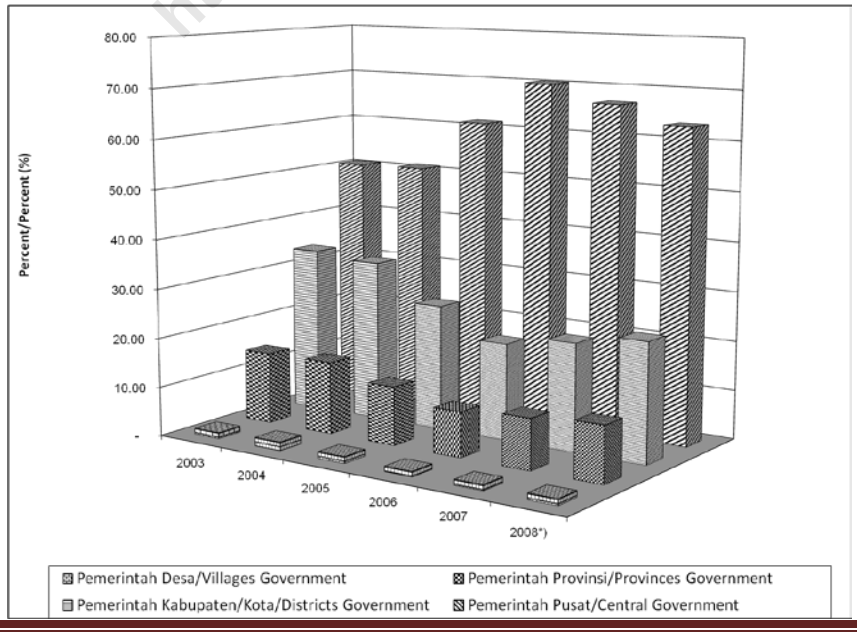

http://www.bps.go.id

bahwa peranan pemerintah pusat dalam pemerintahan umum masih cukup besar.

Sementara itu, peranan pemerintah kabupaten/kota memiliki porsi terbesar kedua setelah pemerintah pusat diikuti oleh pemerintah propinsi dan pemerintah desa.

3.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penyerapan dana yang diperoleh pemerintah, mengingat secara rata-rata belanja pegawai meyerap 23,32 persen dari penerimaan pemerintah selama tahun 2003-2008. Seperti terlihat pada Tabel 3.1 (dan Grafik 3.1), persentase belanja pegawai berkisar antara 21,85 hingga 25,21 persen. Besarnya persentase ini diakibatkan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam sistem penggajian pegawai negeri dan perubahan- perubahan penerimaan pemerintah umum dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, persentase belanja pegawai terhadap PDB, secara rata-rata, sebesar 4,49 persen, dimana terendah terjadi pada tahun 2005 dan tertinggi terjadi pada tahun 2004 (Tabel 3.3 dan Grafik 3.3). Besaran ini menunjukkan bahwa peranan pemerintahan umum dalam perekonomian nasional khususnya sisi produksi belumlah besar.

general government activities, specifically in deciding material expenditure.

Meanwhile, the share of districts government was the second biggest share to the general government followed by provinces government and villages government.

3.2. Compensation of Employees

Compensation of employees mainly absorbs the general government revenue. On average, 23.32 percent is spent to pay the wages and salaries of government employees and military personnel. As seen in the Table 3.1 (and Graph 3.1), percentage of compensation of employee was in range 21.85 to 25.21 percent. This figure was resulted from the government policies such as changing in government payroll system and relatively high variations in annual general government revenues.

Furthermore, the percentage of compensation of employee to GDP was 4.49 percent, on average. It reached the trough in 2005 and reached the peak in 2005 (Table 3.3 and Graph 3.3). The figure shows that the government's role in the national economy, specifically at production side, is relatively small.

https://www.bps.go.id

Tabel : 3.3 Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum terhadap Produk Domestik Bruto
Table *Percentage of General Government Account's Components to the Gross Domestic Product*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Pengeluaran Konsumsi/ *Final Consumption Expenditure*	8,13	8,32	8,11	8,63	8,35	8,41	8,33
2	Belanja Pegawai/ *Personnel Expenditure*	4,49	4,75	4,29	4,41	4,52	4,47	4,49
3	Subsidi/*Subsidies*	2,15	3,72	4,35	3,22	3,80	5,56	3,80
4	Tabungan Bruto/*Gross Savings*	4,98	4,44	3,92	5,42	4,27	4,63	4,61
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	4,10	3,33	3,25	3,41	3,39	3,66	3,52
6	PDB (Trilyun Rupiah)/*GDP (Trillion Rupiahs)*	2 013 675	2 295 826	2 774 281	3 339 480	3 949 321	4 954 029	

*) angka sementara/*preliminary figures*

Grafik : 3.3 Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum terhadap Produk Domestik Bruto
Graph *Percentage of General Government Account's Components to the Gross Domestic Product*

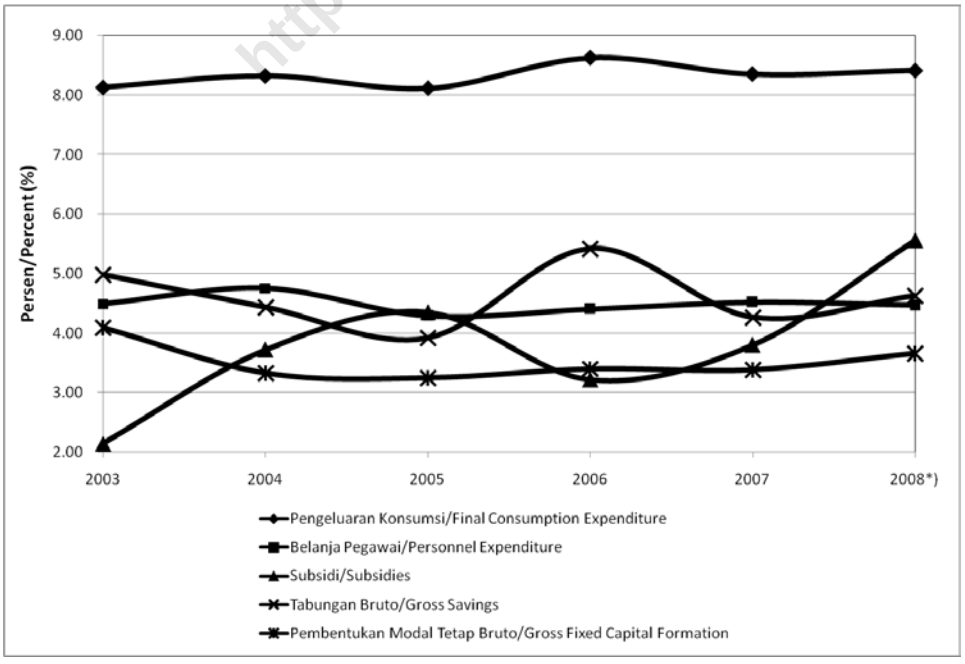

https://www.bps.go.id

Tabel / *Table* : 3.4 Proporsi Belanja Pegawai menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Personnel Expenditure by Level of Government*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Pemerintahan Umum/ *General Government*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat/ *Central Government*	61,36	57,69	46,66	49,53	50,32	50,79	52,72
3	Pemerintah Provinsi/ *Provinces Government*	11,03	10,04	9,37	8,86	8,73	9,70	9,62
4	Pemerintah Kabupaten/Kota/ *Districts Government*	25,71	30,66	41,78	39,52	38,91	37,53	35,68
5	Pemerintah Desa/ *Villages Government*	1,90	1,61	2,20	2,08	2,05	1,98	1,97
6	Jumlah Belanja Pegawai (Miliar Rp)/ *Total Personnel Expenditure (Billions Rupiahs)*	90 416	109 112	119 146	147 119	178 606	221 286	

*) angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Grafik / *Graph* : 3.4 Proporsi Belanja Pegawai menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Personnel Expenditure by Level of Government*

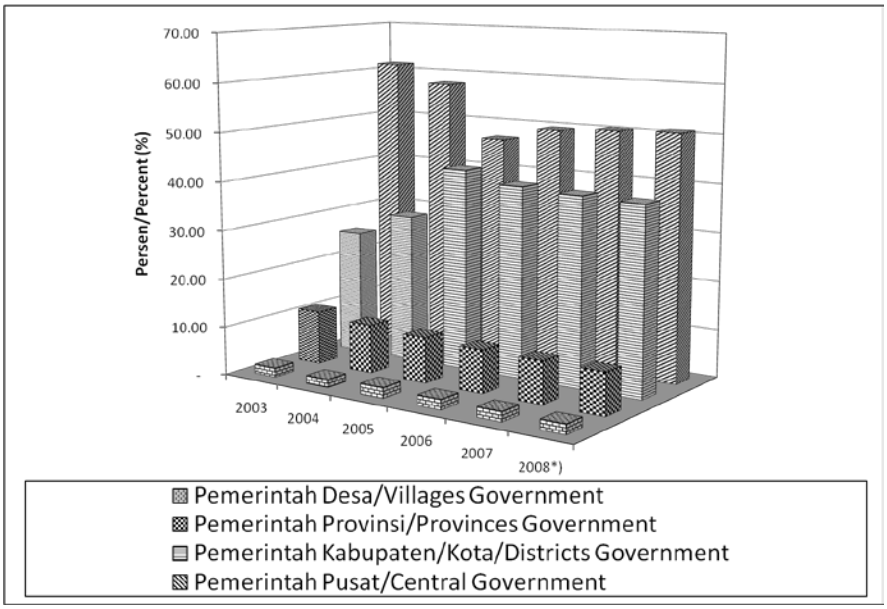

Sementara itu, berdasarkan tingkat pemerintahan, belanja pegawai didominasi oleh pemerintah pusat yang secara rata-rata memiliki porsi 52,72 persen. Porsi terbesar kedua diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang diikuti oleh pemerintah propinsi dan desa. Hal yang menarik adalah tren dari porsi pemerintah propinsi mengalami penurunan sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengalami peningkatan (Tabel 3.4 dan Grafik 3.4).

Meanwhile, by level of government, compensation of employee was dominated by central government by 52.72 percent. The second biggest share was districts government followed by provinces and villages government. The important point is that provinces government experienced decreasing share while districts government experienced increasing share (Table 3.4 and Graph 3.4).

3.3. Pengeluaran Konsumsi

Mengingat bagian terbesar dari pengeluaran konsumsi pemerintah umum merupakan belanja pegawai dan belanja barang, maka fluktuasi pengeluaran konsumsi mengikuti fluktuasi yang terjadi pada kedua belanja tersebut. Seperti terlihat pada Tabel 3.1 dan Grafik 3.1, rata-rata persentase pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap total penerimaan pemerintah sebesar 43,21 persen. Selama periode 2003-2008, fluktuasi pengeluaran pemerintah sama dengan fluktuasi yang terjadi pada biaya antara dan belanja pegawai. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 44,34 persen dan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 41,02 persen.

Sedangkan persentase pengeluaran konsumsi terhadap PDB, menunjukkan bahwa peranan pemerintah umum dalam

3.3. Consumption Expenditure

Due to the fact that a large part of final comsumption expenditure is taken up by the previous two item, the purchase of goods (as intermediate input) and the compensation of employees, the fluctuations in the final consumption expenditure will be affected by the magnitude of those two components. As seen in Table 3.1 (and Graph 3.1), the final consumption expenditure is approximately a function of its expenditure. It averages 43.21 percent during the 2003-2008. During the period, it reached the peak in 2003 at 44.34 percent and it reached the trough in 2008 at 41.02 percent.

Furthermore, the percentage of final consumption expenditure to GDP was 8.33 percent on average indicating that during

https://www.bps.go.id

Tabel / *Table* : 3.5 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Final Consumption Expenditures by Level of Government*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Pemerintahan Umum/ *General Government*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat/ *Central Government*	57,74	55,30	51,92	58,27	54,87	51,47	54,93
3	Pemerintah Provinsi/ *Provinces Government*	12,13	11,75	11,28	9,61	10,25	13,01	11,34
4	Pemerintah Kabupaten/Kota/ *Districts Government*	28,52	31,27	34,91	30,47	33,10	33,71	32,00
5	Pemerintah Desa/ *Villages Government*	1,61	1,68	1,89	1,64	1,78	1,80	1,73
6	Jumlah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum/*Total Final Consumption Expenditures*	163 701	191 056	224 981	288 080	329 760	416 867	

*) angka sementara/*preliminary figures*

Grafik / *Graph* : 3.5 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Final Consumption Expenditures by Level of Government*

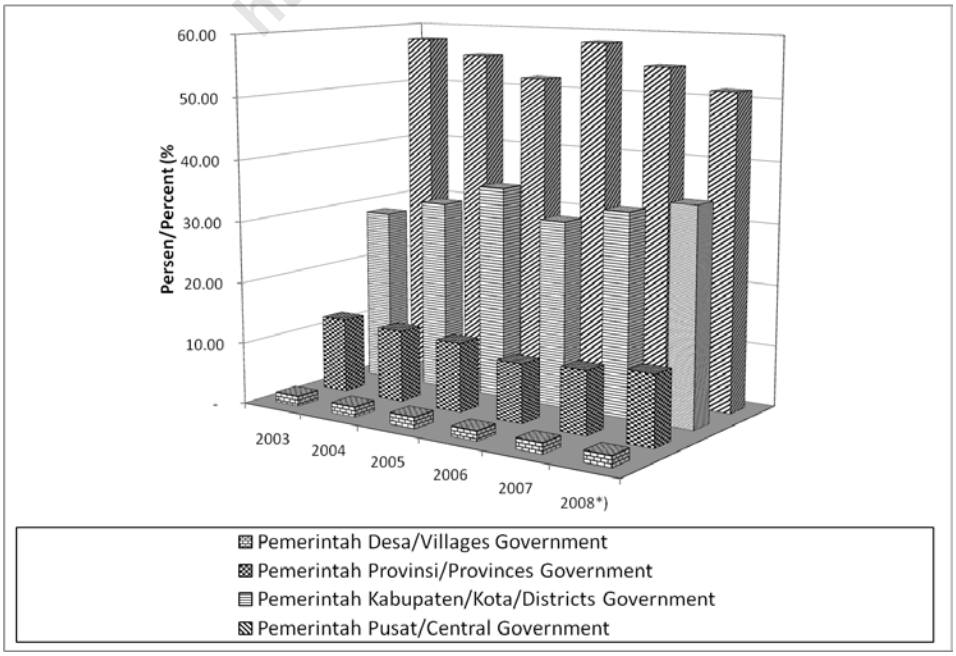

http://www.bps.go.id

perekonomian nasional relatif stabil. Secara rata-rata selama tahun 2003-2008 sebesar 8,33 persen (Tabel 3.3 dan Grafik 3.3).

Selanjutnya, menurut tingkat pemerintahan, secara rata-rata pemerintah pusat menyumbang 54,93 persen dari total pengeluaran konsumsi pemerintah umum. Kemudian peranannya diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 32,00 persen, pemerintah propinsi 11,34 persen, dan pemerintah desa yaitu sebesar 1,73 persen (Tabel 3.5 dan Grafik 3.5).

the period 2003-2008, the share of general government's consumption expenditure was 8.13 percent (Table 3.3 and Graph 3.3).

Meanwhile, by level of government, on average about 54.93 percent of consumption occurs in the central government, 11.34 percent in the provincial government, 32.00 percent in the regency government, and only 1.73 percent in the village government (Table 3.5 and Graph 3.5).

https://www.bps.go.id

3.4. Tabungan Bruto

Persentase tabungan bruto (tabungan+ penyusutan) pemerintah umum terhadap total penerimaan pemerintah umum cukup bervariasi selama tahun 2003-2008, dengan rata-rata sebesar 23,91 persen dan persentase terbesar terjadi pada tahun 2003 dan terkecil pada tahun 2005 (Tabel 3.1 dan Grafik 3.1).

Sedangkan peranan tabungan bruto dalam PDB, secara rata-rata sebesar 4,61 persen dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 5,42 dan terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 3,92 (Tabel 3.3 dan Grafik 3.3).

Selanjutnya, peranan tabungan bruto pemerintah umum dilihat sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam total

3.4. Gross Savings

The percentage of gross savings (savings plus depreciation) to general government revenue fluctuated during the period 2003-2008 which on average was 23.91 percent. The highest was in 2003 while the lowest was in 2005 (Table 3.1 and Graph 3.1).

Moreover, its share to GDP was 4.61 percent on average in which the highest was in 2006 at 5.42 while the lowest was in 2005 at 3.92 percent (Table 3.3 dan Graph 3.3)

In addition, gross savings can be regarded as source of financing in gross fixed capital formation (GFCF). On average,

Tabel / *Table* : 3.6 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Tabungan Bruto Pemerintahan Umum terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional
Percentage of General Government's Gross Fixed Capital Formation and General Government's Gross Savings to the National Gross Fixed Capital Formation

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintahan Umum terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional/ *Percentage of the General Government's Gross Fixed Capital Formation to the Total Gross Fixed Capital Formation*	21,02	14,83	13,76	14,11	13,56	13,24	15,09
2	Persentase Tabungan Bruto Pemerintahan Umum terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional/*Percentage of the General Government's Gross Savings to the Total Gross Fixed Capital Formation*	25,55	19,76	16,59	22,47	17,10	16,75	19,71
3	Persentase Tabungan Bruto Pemerintahan Umum terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintahan Umum/ *Percentage of the General Government's Gross Savings to the General Government's Gross Fixed Capital Formation*	121,55	133,26	120,62	159,23	126,16	126,57	131,23
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional (Miliar Rp)/*The Total Gross Fixed Capital Formation (Billions Rupiahs)*	392 789	515 381	655 854	805 786	986 215	1 369 583	
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintahan Umum (Miliar Rp)/*The General Government's Gross Fixed Capital Formation (Billions Rupiahs)*	82 562	76 437	90 213	113 721	133 690	181 308	

*) angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Grafikl Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Tabungan Bruto Pemerintahan Umum terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional

Graph : 3.6 *Percentage of General Government's Gross Fixed Capital Formation and General Government's Gross Savings to the National Gross Fixed Capital Formation*

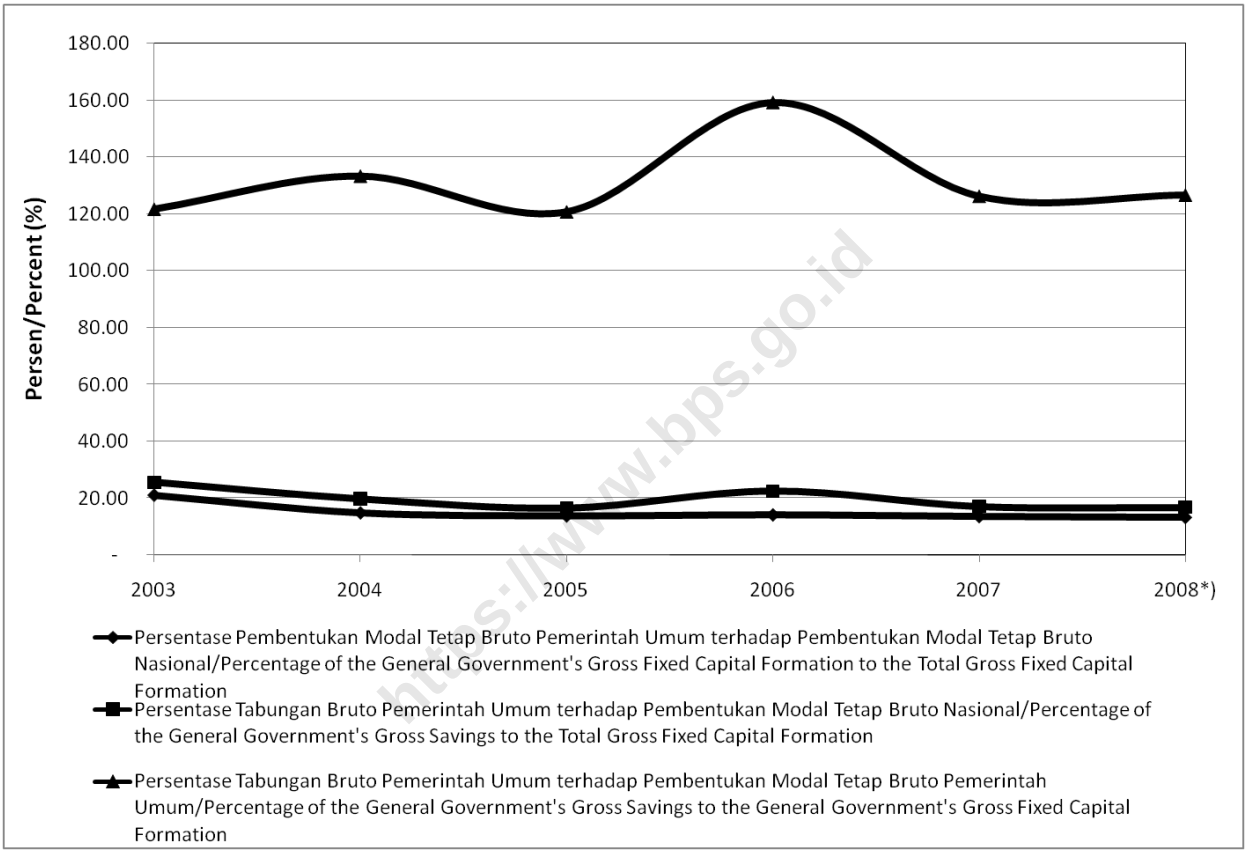

https://www.bps.go.id

Tabel / *Table* : 3.7 Proporsi Tabungan Bruto menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Gross Savings by Level of Government*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Pemerintahan Umum/ *General Government*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat/ *Central Government*	94,32	80,80	86,83	67,19	72,85	88,21	81,70
3	Pemerintah Provinsi/ *Provinces Government*	0,90	1,89	6,30	12,28	14,62	5,98	7,00
4	Pemerintah Kabupaten/Kota/ *Districts Government*	4,68	16,03	6,00	19,45	12,13	5,46	10,62
5	Pemerintah Desa/ *Villages Government*	0,11	1,28	0,87	1,09	0,39	0,36	0,68
6	Jumlah Tabungan Bruto (Miliar Rp)/*Total Gross Savings (Billions Rupiahs)*	100 356	101 856	108 813	181 082	168 661	229 473	

*)angka sementara/*preliminary figures*

http://www.bps.go.id

Grafik / *Graph* : 3.7 Proporsi Tabungan Bruto menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Gross Savings by Level of Government*

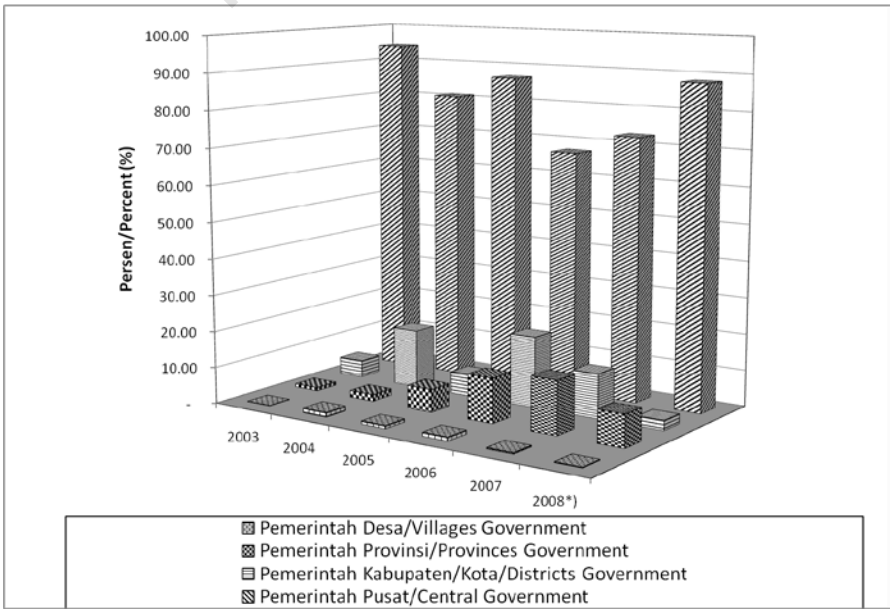

Tabel / *Table* : 3.8 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Gross Fixed Capital Formation by Level of Government*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Pemerintahan Umum/ *General Government*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat/ *Central Government*	57,18	63,51	40,85	51,82	47,92	39,87	50,19
3	Pemerintah Provinsi/ *Provinces Government*	12,28	14,19	19,13	15,67	15,94	18,41	15,94
4	Pemerintah Kabupaten/Kota/ *Districts Government*	27,48	21,24	38,59	31,34	34,33	39,64	32,10
5	Pemerintah Desa/ *Villages Government*	3,05	1,06	1,43	1,17	1,81	2,09	1,77
6	Jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto/ *Total Gross Fixed capital Formation*	82 562	76 437	90 213	113 721	133 690	181 308	

*) angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Grafik / *Graph* : 3.8 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Gross Fixed Capital Formation by Level of Government*

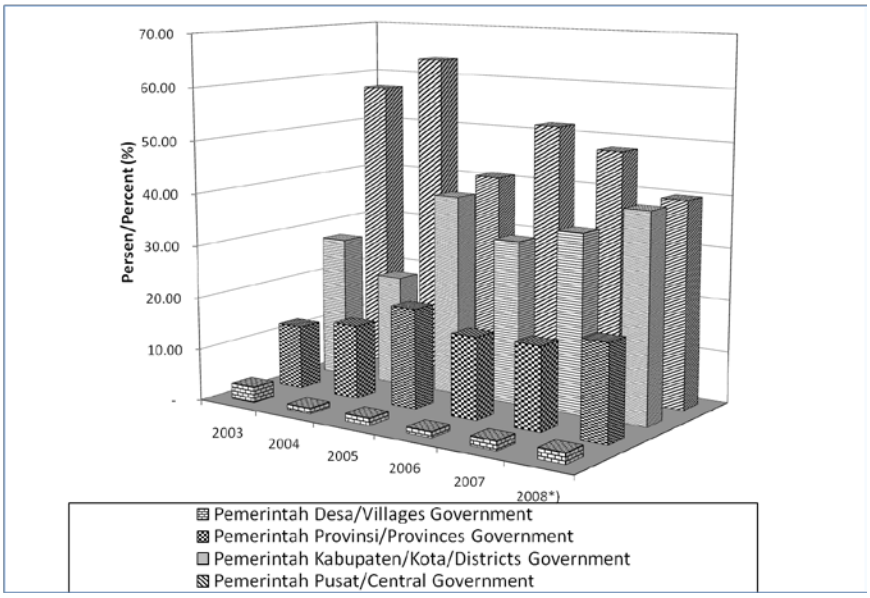

PMTB. Peranan tabungan bruto dalam PMTB cukup besar yaitu rata-rata sebesar 19,71 persen. Sedangkan peranannya terhadap PMTB pemerintah umum sebesar 131,23 persen (Tabel 3.6 dan Grafik 3.6). Ini menunjukkan bahwa selama periode 2003-2008, 20 persen PMTB nasional dibiayai dari tabungan bruto pemerintah umum dan pemerintah umum dapat membiayai investasinya sendiri.

Sedangkan menurut tingkat pemerintahan, pemerintah pusat memiliki share yang terbesar diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota, propinsi dan desa (Tabel 3.7 dan Grafik 3.7).

the share of gross savings to national GFCF was 19.71 while its share to general government's GFCF was 131.23 percent (Table 3.6 dan Graph 3.6). These figures reflected that 20 percent of national GFCF was financed by government gross savings and the general government could finance their investment.

Meanwhile, central government had highest share to government's gross savings followed by districts, provinces, and villages government (Table 3.7 and Graph 3.7)

https://www.bps.go.id

3.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Peranan PMTB pemerintah umum dalam PMTB nasional semakin berkurang selama periode 2003-2008 dan secara rata-rata peranannya sebesar 15,09 persen (Tabel 3.6 dan Grafik 3.6). Besarnya persentase ini mencerminkan hasil yang dicapai pemerintah umum dalam program pembangunan nasional.

Sedangkan peranan PMTB pemerintah umum dalam PDB terlihat semakin berkurang. Secara rata-rata, selama periode tersebut peranannya sebesar 3,52 persen. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2003 dan terendah terjadi pada tahun 2005 (Tabel 3.3 dan Grafik 3.3).

3.5. Gross Fixed Capital Formation (GFCF)

The share of general government's GFCF in national GFCF has been decreasing during the period 2003-2008. As seen in Table 3.6 and Graph 3.6, on average the share was 15.09 percent. This figure reflects the government's effort in the national development.

The share of government's GFCF in GDP experienced the same magnitude with that in national GFCF. On average, during the period the share was 3.52 percent. The highest share was in 2003 while the lowest was in 2005 (Table 3.3 and Graph 3.3).

Sementara itu, dilihat menurut tingkat pemerintahan, besaran PMTB pemerintah umum disumbangkan oleh pemerintah pusat sebesar 50,19 persen. Selanjutnya, sumbangan berasal dari pemerintah kabupaten/kota, propinsi, dan desa masing-masing sebesar 32,10, 15,94, dan 1,77 persen (lihat Tabel 3.8 dan Grafik 3.8).

Meanwhile, by level of government, GFCF was contributed by central government by 50.19 percent. The rest was contributed by districts, provinces, and villages government by 32.10, 15.94, and 1.77 percent, respectively.

3.6. Subsidi

Persentase subsidi terhadap total penerimaan pemerintah umum cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berfluktuasinya subsidi ini berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah dan situasi perekonomian secara umum. Selama periode 2003-2008 rata-rata persentase subsidi terhadap total penerimaan pemerintahdan umum adalah sebesar 19,60 persen. Persentase subsidi tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 23,01 dan persentase terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 11,70 persen. Tingginya subsidi pada tahun 2005 disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia yang menyebabkan besarnya subsidi BBM dan juga subsidi harga pada tahun-tahun tersebut. (Tabel 3.1 dan Grafik 3.1).

Sedangkan rasio subsidi terhadap PDB Indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2008 secara umum relative kecil, yaitu 3,80 persen. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,56

3.6. Subsidies

The percentage of subsidies to the total general government's revenues varies during the period 2003-2008 due to the fact that the subsidies is mostly depending on the availability of government's funds and the overall economic performance. On average, the percentage of subsidies to the general government's receives during the period 2003-2008 was 19.60 percent. The highest percentage was 23.01 in 2005 and the lowest was 11.70 percent in 2003. The highest subsidies in 2005 was caused by the rocketer of the world's oil price which affeced the domestic oil's price subsidies and other prices subsidies (Table 3.1 and Graph 3.1).

Furthermore, the percentage of subsidies to GDP during the period 2003-2008 was relatively small, 3.80 percent. The highest was 5.56 percent in 2008 and the

https://www.bps.go.id

persen dan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 2,15 perssen (Tabel 3.3 dan Grafik 3.3).

3.7. Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber dalam penerimaan pemerintah umum. Dari tahun ke tahun, persentasenya cukup tinggi dan relatif stabil. Dalam periode 2003-2008 rata-rata penerimaan pajak terhadap total penerimaan pemerintah umum adalah 69,04 persen, dengan rincian 35,40 persen berasal dari pajak langsung dan 33,63 persen berasal dari pajak tidak langsung. Besarnya porsi pajak langsung ini disebabkan adanya pajak perseroan minyak yang menjadi sumber terbesar penerimaan pemerintah (Tabel 3.1 dan Grafik 3.1).

Seperti terlihat pada tabel, persentase tertinggi penerimaan pemerintah umum dari pajak adalah sebesar 71,04 persen pada tahun 2007; di mana 35,95 persen diantaranya berasal dari pajak langsung dan 35,08 persen merupakan pajak tidak langsung. Sebaliknya, persentase terendah adalah sebesar 65,18 persen pada tahun 2006; di mana 34,65 persen berasal dari pajak langsung, dan 30,53 persen merupakan pajak tidak langsung.

Kalau dibandingkan persentase tertinggi dengan persentase terendah, bedanya sebesar 5,86 persen, yang menunjukkan bahwa persentase

lowest was 2.15 in 2003 (Table 3.3 and Graph 3.3).

3.7. Taxes

Taxes are the main source of general government's revenues. The percentage of tax revenue was high and relatively stable. During the period 2003-2008, the average of tax revenue over total revenue was 69.04 percent, a combination of 35.40 percent as direct taxes and 33.63 percent as indirect taxes. The higher proportion in direct taxes due to the inclusion of taxes levied on oil corporations as the largest source of government income (Table 3.1 and Graph 3.1).

As seen in the table, the highest percentage of tax revenue occurred in 2007. At that time tax revenue was 71.04 percent of total general government's revenue, consisting of 35.95 percent direct taxes and 35.08 percent indirect taxes. The lowest percentage occurred in 2006 when the tax revenue dropped to 65.18 percent in which 34.65 percent of direct taxes and 30.53 percent of indirect taxes.

Comparing the highest and the lowest tax level, the gap was 5.86 percent. The size of this magnitude indicates that

https://www.bps.go.id

Tabel / *Table* : 3.9 Proporsi Penerimaan Pajak menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Tax Revenues by Level of Government*

No	Keterangan/Items	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	Rata-Rata/ Average
1	Pemerintahan Umum/ *General Government*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat/ *Central Government*	93,93	94,42	94,06	93,20	92,48	93,00	93,51
3	Pemerintah Provinsi/ *Provinces Government*	4,37	4,59	4,50	5,29	5,88	4,84	4,91
4	Pemerintah Kabupaten/Kota/ *Districts Government*	1,54	0,86	1,24	1,27	1,38	1,83	1,35
5	Pemerintah Desa/ *Villages Government*	0,16	0,13	0,19	0,23	0,26	0,34	0,22
6	Jumlah Penerimaan Pajak (Miliar Rp)/ *Total Tax Revenues (Billion Rupiahs)*	255 797	297 481	368 726	438 901	531 292	708 271	

*)angka sementara/*preliminary figures*

Grafik / *Graph* : 3.9 Proporsi Penerimaan Pajak menurut Tingkat Pemerintahan / *Proportion of Tax Revenues by Level of Government*

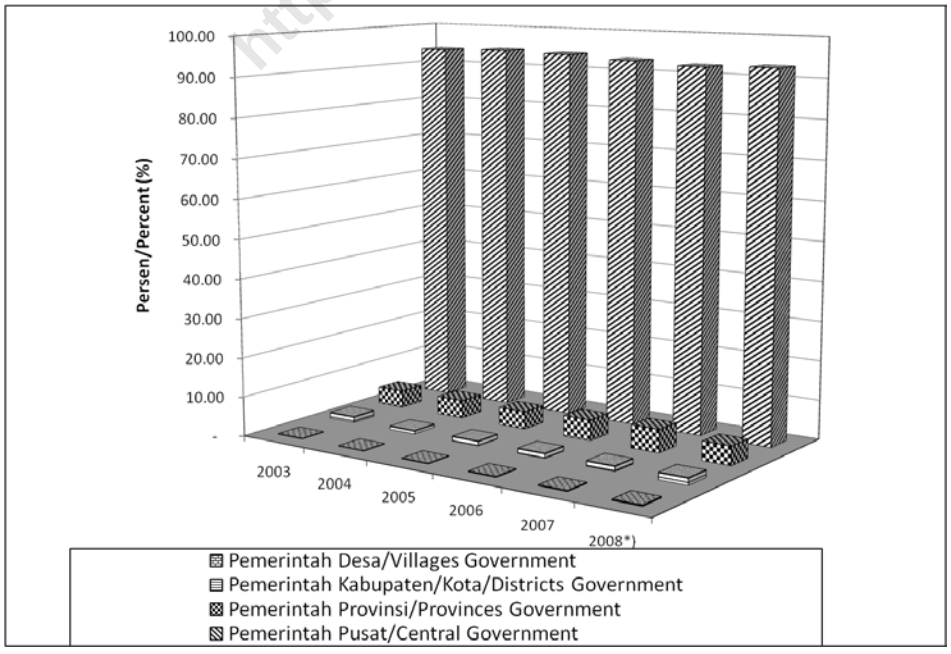

https://www.bps.go.id

penerimaan pajak terhadap total penerimaan pemerintah umum relatif stabil.

Proporsi penerimaan pajak pemerintah pusat merupakan porsi terbesar dari penerimaan pajak pemerintah, yaitu rata-rata sebesar 93,51 persen selama tahun 2003-2008 (Tabel 3.9 dan Grafik 3.9). Rata-rata penerimaan pajak pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan desa masing-masing sebesar 4,91; 1,35; dan 0,22 persen.

Berdasarkan grafik-grafik yang ada dapat dilihat bahwa di antara tujuh variabel yang disajikan persentasenya tidak menunjukkan gejolak naik turun yang searah. Tabungan bruto misalnya, agak berfluktuasi dan penerimaan dari pajak relatif stabil. Oleh karena itu bila ditinjau dari segi persentase saja maka dapat disimpulkan bahwa tidak terlihat suatu pola hubungan yang jelas di antara variabel-variabel yang disajikan persentasenya tersebut. Namun ada dua pasang variabel yang menunjukkan pola naik turun yang searah. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi dan belanja pegawai. Keduanya bergerak searah, sehingga dapat diduga bahwa suatu variabel lain mengontrol keduanya. Pasangan kedua yang mungkin mempunyai korelasi tinggi adalah pasangan antara PMTB dengan tabungan bruto. Keduanya naik dan turun bersama-sama walaupun

percentage of total tax revenues to total government's receives is relatively stable.

Central government tax revenue holds the biggest proportion of the whole tax revenues. It reached 93.51 percent in average in the period 2003-20078 (see Table 3.9 and Graph 3.9). The average of tax revenues collected by province, regency and village governments were 4.91, 1.35, and 0.22 percent respectively.

Based on the graphs of seven variables considered, one may generalize that the patterns of their percentages are not in similar nature. Tax revenue and gross savings, for instance, are less unstable percentage. Therefore, from the percentage figures' point of view, a clear relationship among seven variables was not seen. However, two pairs of variables seem to show at least positive correlations. General government consumption expenditure and compensation of employees make up the first pair. Those two variables move together so that it can be hypothesized that they are controlled by a third variable. The second pair consists of general government gross savings and gross fixed capital formation. The two move together, although slope differences occurs, so that a high correlation coefficient is expected. A high correlation between savings and capital formation is, of course,

https://www.bps.go.id

perbedaan arah dan kemiringan lereng grafik terjadi di sana-sini. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi makro karena salah satu sumber pembiayaan PMTB yang terbesar adalah tabungan bruto.

logical according to macroeconomic theory because the largest source of gross fixed capital formation comes from gross savings.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

LAMPIRAN/
APPENDIX

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 1.a NERACA PRODUKSI PEMERINTAHAN UMUM / *PRODUCTION ACCOUNT OF GENERAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya/*Input*						
1. Biaya antara/ *Intermediate consumption*	68 840 834	78 862 855	102 279 118	136 342 128	150 236 249	205 402 242
2. Belanja pegawai/ *Compensation of Employees*	90 416 348	109 112 224	119 145 547	147 119 174	178 605 968	221 286 068
3. Penyusutan barang modal /*Consumption of fixed capital*	11 189 274	12 017 327	15 987 159	20 680 469	26 737 960	36 261 513
4. Pajak tak langsung neto/ *Net indirect taxes*	-	-	-	-	-	-
Produksi/*Output*						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri/ *Production for own consumption*	163 701 240	191 055 629	224 980 540	288 079 870	329 760 104	416 866 671
6. Penerimaan dari jasa/*Non-commodity sales*	5 447 043	6 477 532	10 820 973	13 992 515	20 602 295	23 395 436
7. Produksi berupa barang/*Commodities produced*	1 298 174	2 459 245	1 610 311	2 069 386	5 217 778	22 687 716
JUMLAH BIAYA/*TOTAL INPUT* (PRODUKSI/ *OUTPUT*)	**170 446 457**	**199 992 406**	**237 411 824**	**304 141 771**	**355 580 177**	**462 949 823**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 1.b NERACA PRODUKSI PEMERINTAH PUSAT / *PRODUCTION ACCOUNT OF CENTRAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya/*Input*						
1. Biaya antara/ *Intermediate consumption*	34 809 714	40 125 840	62 743 530	95 691 504	100 439 141	130 131 579
2. Belanja pegawai/ *Compen-sation of Employees*	55 482 192	62 943 880	55 589 251	72 872 610	89 871 016	112 394 113
3. Penyusutan barang modal /*Consumption of fixed capital*	9 442 567	9 708 910	7 370 699	11 786 217	12 811 528	14 455 801
4. Pajak tak langsung neto/ *Net indirect taxes*	-	-	-	-	-	
Produksi/*Output*						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri/ *Production for own consumption*	94 513 532	105 655 837	116 814 636	167 877 201	180 937 322	214 581 596
6. Penerimaan dari jasa/*Non-commodity sales*	4 441 146	5 363 484	7 880 418	10 866 115	18 077 019	20 652 573
7. Produksi berupa barang/*Commodities produced*	779 794	1 759 309	1 008 426	1 607 015	4 107 344	21 747 323
JUMLAH BIAYA/*TOTAL INPUT* (PRODUKSI/ *OUTPUT*)	**99 734 472**	**112 778 630**	**125 703 480**	**180 350 331**	**203 121 685**	**256 981 493**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran : 1.c NERACA PRODUKSI PEMERINTAH PROPINSI
Appendix *PRODUCTION ACCOUNT OF PROVINCIAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya/*Input*						
1. Biaya antara/ *Intermediate consumption*	9 968 771	11 559 982	12 117 554	12 459 310	15 332 890	27 511 439
2. Belanja pegawai/ *Compen-sation of Employees*	9 970 691	10 955 222	11 162 560	13 040 120	15 584 754	21 467 311
3. Penyusutan barang modal /*Consumption of fixed capital*	498 535	547 761	3 451 727	3 563 010	4 262 878	6 674 724
4. Pajak tak langsung neto/ *Net indirect taxes*	-	-	-	-	-	
Produksi/*Output*						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri/ *Production for own consumption*	19 859 984	22 452 507	25 384 016	27 696 987	33 797 209	54 252 071
6. Penerimaan dari jasa/*Non-commodity sales*	402 252	367 563	994 916	1 189 531	1 000 125	1 013 205
7. Produksi berupa barang/*Commodities produced*	175 760	242 895	352 909	175 922	383 188	388 199
JUMLAH BIAYA/*TOTAL INPUT* (PRODUKSI/ *OUTPUT*)	**20 437 996**	**23 062 965**	**26 731 841**	**29 062 440**	**35 180 522**	**55 653 475**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 1.d

NERACA PRODUKSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PRODUCTION ACCOUNT OF REGENCIAL GOVERNMENT

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya/*Input*						
1. Biaya antara/ *Intermediate consumption*	23 236 630	25 818 181	26 047 132	26 781 748	32 741 007	45 371 263
2. Belanja pegawai/ *Compen-sation of Employees*	23 243 045	33 452 466	49 774 049	58 146 122	69 492 688	83 053 412
3. Penyusutan barang modal /*Consumption of fixed capital*	1 162 152	1 672 623	4 906 496	5 064 680	9 180 376	14 374 439
4. Pajak tak langsung neto/ *Net indirect taxes*	-	-	-	-	-	
Produksi/*Output*						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri/ *Production for own consumption*	46 695 563	59 739 744	78 533 062	87 769 231	109 161 675	140 517 262
6. Penerimaan dari jasa/*Non-commodity sales*	603 644	746 485	1 945 639	1 936 871	1 707 331	1 729 658
7. Produksi berupa barang/*Commodities produced*	342 620	457 041	248 976	286 448	545 066	552 194
JUMLAH BIAYA/*TOTAL INPUT* (PRODUKSI/ *OUTPUT*)	**47 641 827**	**60 943 270**	**80 727 677**	**89 992 550**	**111 414 072**	**149 146 503**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 1.e

NERACA PRODUKSI PEMERINTAH DESA
PRODUCTION ACCOUNT OF VILLAGE GOVERNMENT

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya/*Input*						
1. Biaya antara/ *Intermediate consumption*	825 719	1 358 852	1 370 902	1 409 566	1 723 211	2 387 961
2. Belanja pegawai/ *Compen-sation of Employees*	1 720 421	1 760 656	2 619 687	3 060 322	3 657 510	4 371 232
3. Penyusutan barang modal /*Consumption of fixed capital*	86 021	88 033	258 237	266 562	483 178	756 549
4. Pajak tak langsung neto/ *Net indirect taxes*	-	-	-	-	-	-
Produksi/*Output*						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri/ *Production for own consumption*	2 632 161	3 207 541	4 248 825	4 736 450	5 863 899	7 515 743
6. Penerimaan dari jasa/*Non-commodity sales*	-	-	-	-	-	-
7. Produksi berupa barang/*Commodities produced*	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BIAYA/*TOTAL INPUT* (PRODUKSI/ *OUTPUT*)	**2 632 161**	**3 207 541**	**4 248 825**	**4 736 450**	**5 863 899**	**7 515 743**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran : 2.a NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN UMUM
Appendix *INCOME AND OUTLAY ACCOUNT OF GENERAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/Millions of Rupiahs

Pengeluaran/*Expenditure*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi/ *Final consumption expenditure*	163 701 240	191 055 629	224 980 540	288 079 870	329 760 104	416 866 671
2. Pendapatan kekayaan yang dibayarkan/*Property income paid*	66 924 621	62 350 503	57 650 778	79 025 759	79 550 500	88 622 602
a. Bunga/*Interest*	66 924 621	62 350 503	57 650 778	79 025 759	79 550 500	88 622 602
b. Laba saham/*Dividends*	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah & Royalti /*Land rent & royalties*	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi/*Subsidies*	43 208 119	85 463 976	120 707 802	107 452 819	150 214 200	275 290 539
4. Bantuan sosial/*Social assistance grants*	3 949 301	1 874 440	25 135 842	34 154 801	41 464 548	36 047 455
5. Imputasi kesejahteraan pegawai/ *Unfunded employee welfare*	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580	5 008 268	6 195 038
6. Transfer berjalan kepada/ *Current transfer to* :	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya/*Other resident sectors*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan/*Savings*	89 167 200	89 839 124	92 825 795	160 401 393	141 923 092	193 211 612
JUMLAH PENGELUARAN/ TOTAL DISBURSEMENTS	**369 165 572**	**432 897 184**	**524 524 939**	**673 326 223**	**747 920 713**	**1 016 233 916**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Penerimaan/*Receipts*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Lababersih/*Op.surplus*	-	-	-	-	-	-
2. Pendapatan kekayaan yang diterima/*Property income receipts*	92 324 359	110 556 725	132 545 713	206 783 781	180 279 917	266 470 260
a. Bunga/*Interest*	36 607	-	1 975	1 787 610	578 954	616 448
b. Laba saham/*Dividends*	13 101 458	10 732 948	14 495 464	26 200 233	41 201 982	37 638 948
c. Sewa tanah/*Landrent & royalties*	79 186 294	99 823 777	118 048 273	178 795 938	138 498 982	228 214 863
3. Pajak tak langsung/ *Indirect taxes*	128 480 364	147 997 976	174 427 118	205 595 533	262 403 025	344 936 452
a. Pajak import/*Import duty*	32 927 126	43 828 976	62 263 021	56 937 609	72 830 542	107 837 888
b. Pajak hasil produksi DN/*Taxes on domestic goods and services*	85 630 030	91 970 090	95 797 997	128 916 027	163 616 627	208 892 884
c. Pajak tak langsung lainnya/*Other indirect taxes*	9 923 208	12 198 910	16 366 100	19 741 897	25 955 856	28 205 680
4. Pajak langsung/*direct taxes*	127 316 426	149 483 244	194 299 110	233 305 654	268 888 801	363 334 056
a. PPh perseroan minyak /*Oil company income taxes*	18 780 899	22 946 615	34 985 563	43 190 107	44 006 200	77 019 258
b. PPh perseroan bukan minyak/*Non-oil company income taxes*	103 831 000	121 445 897	152 800 629	183 368 177	218 505 902	279 774 632
c. Pajak langsung lainnya/ *Other direct taxes*	4 704 526	5 090 732	6 512 918	6 747 370	6 376 699	6 540 166
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda/*Compulsory fees fines & penalties*	8 130 296	7 143 653	9 977 453	12 601 604	16 968 696	19 414 915
6. Imputasi kesejahteraan pegawai/*Un-funded employee contribution*	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580	5 008 268	6 195 038
7. Transfer dari/*Current transfer from*:	10 699 037	15 402 074	10 051 363	10 828 071	14 372 006	15 883 196
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya/*Other resident sector*	10 699 037	15 402 074	10 051 363	10 828 071	14 372 006	15 883 196
JUMLAH PENERIMAAN/ *TOTAL RECEIPTS*	**369 165 572**	**432 897 184**	**524 524 939**	**673 326 223**	**747 920 713**	**1 016 233 916**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran : 2.b NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT
Appendix *INCOME AND OUTLAY ACCOUNT OF CENTRAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/Millions of Rupiahs

Pengeluaran/*Expenditure*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi/ *Final consumption expenditure*	94 513 532	105 655 837	116 814 636	167 877 201	180 937 322	214 581 596
2. Pendapatan kekayaan yang dibayarkan/*Property income paid*	66 782 389	62 350 503	57 650 778	79 025 759	79 550 500	88 622 602
a. Bunga/*Interest*	66 782 389	62 350 503	57 650 778	79 025 759	79 550 500	88 622 602
b. Laba saham/*Dividends*	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah & Royalti /*Land rent & royalties*	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi/*Subsidies*	43 208 119	85 463 976	120 707 802	107 452 819	150 214 200	275 290 539
4. Bantuan sosial/*Social assistance grants*	-	-	22 421 048	30 222 903	15 598 438	9 169 798
5. Imputasi kesejahteraan pegawai/ *Unfunded employee welfare*	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580	5 008 268	6 195 038
6. Transfer berjalan kepada/ *Current transfer to* :	44 462 799	74 378 363	80 549 715	129 009 249	145 343 800	160 701 408
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	44 462 799	74 378 363	80 549 715	129 009 249	145 343 800	160 701 408
b. Sektor lainnya/*Other resident sectors*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan/*Savings*	85 210 018	72 586 513	87 115 369	109 877 980	110 065 677	187 955 546
JUMLAH PENGELUARAN/ TOTAL DISBURSEMENTS	**336 391 947**	**402 748 704**	**466 062 481**	**627 677 491**	**686 718 206**	**942 516 527**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued*

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Penerimaan/*Receipts*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih/*Op. surplus*	-	-	-	-	-	-
2. Pendapatan kekayaan yang diterima/*Property income receipts*	80 472 916	102 043 151	125 746 632	200 159 798	171 949 390	256 238 525
a. Bunga/*Interest*	36 607	-	1 975	1 787 610	578 954	616 448
b. Laba saham/*Dividends*	12 613 914	9 817 535	12 776 686	22 973 056	35 142 636	30 835 536
c. Sewa tanah/*Landrent & royalties*	67 822 395	92 225 616	112 967 970	175 399 132	136 227 800	224 786 540
3. Pajak tak langsung/ *Indirect taxes*	123 080 364	141 197 976	165 427 118	193 595 533	246 403 025	324 936 452
a. Pajak import/*Import duty*	32 927 126	43 828 976	62 263 021	56 937 609	72 830 542	107 837 888
b. Pajak hasil produksi DN/*Taxes on domestic goods and services*	81 308 034	85 641 193	87 526 998	117 099 830	147 667 959	189 366 461
c. Pajak tak langsung lainnya/*Other indirect taxes*	8 845 204	11 727 807	15 637 100	19 558 094	25 904 524	27 732 103
4. Pajak langsung/*direct taxes*	117 201 048	139 675 829	181 406 611	215 458 823	244 931 577	333 728 704
a. PPh perseroan minyak /*Oil company income taxes*	18 780 899	22 946 615	34 985 563	43 190 107	44 006 200	77 019 258
b. PPh perseroan bukan minyak/*Non-oil company income taxes*	94 704 895	111 952 551	140 394 130	165 643 880	194 582 900	250 484 998
c. Pajak langsung lainnya/ *Other direct taxes*	3 715 254	4 776 663	6 026 918	6 624 836	6 342 477	6 224 448
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda/*Compulsory fees fines & penalties*	2 723 493	2 116 162	2 627 624	3 423 686	4 053 940	5 534 613
6. Imputasi kesejahteraan pegawai/*Un-funded employee contribution*	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580	5 008 268	6 195 038
7. Transfer dari/*Current transfer from*:	10 699 037	15 402 074	10 051 363	10 828 071	14 372 006	15 883 196
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya/*Other resident sector*	10 699 037	15 402 074	10 051 363	10 828 071	14 372 006	15 883 196
JUMLAH PENERIMAAN/ *TOTAL RECEIPTS*	**336 391 947**	**402 748 704**	**488 483 529**	**627 677 491**	**686 718 206**	**942 516 527**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 2.c NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI / *INCOME AND OUTLAY ACCOUNT OF PROVINCIAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Pengeluaran/*Expenditure*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi/ *Final consumption expenditure*	19 859 984	22 452 507	25 384 016	27 696 987	33 797 209	54 252 071
2. Pendapatan kekayaan yang dibayarkan/*Property income paid*	31 752	-	-	-	-	-
a. Bunga/*Interest*	31 752	-	-	-	-	-
b. Laba saham/*Dividends*	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah & Royalti /*Land rent & royalties*	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi/*Subsidies*	-	-	-	-	-	-
4. Bantuan sosial/*Social assistance grants*	1 514 857	456 025	660 470	956 574	6 292 847	6 554 656
5. Imputasi kesejahteraan pegawai/ *Unfunded employee welfare*	-	-	-	-	-	-
6. Transfer berjalan kepada/ *Current transfer to* :	2 765 680	10 011 824	9 717 251	10 580 021	11 519 395	11 770 681
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	2 765 680	10 011 824	9 717 251	10 580 021	11 519 395	11 770 681
b. Sektor lainnya/*Other resident sectors*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan/*Savings*	405 897	1 378 449	3 401 152	18 673 227	20 401 410	7 049 035
JUMLAH PENGELUARAN/ TOTAL DISBURSEMENTS	**24 578 170**	**34 298 805**	**39 162 889**	**57 906 810**	**72 010 860**	**79 626 443**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Penerimaan/*Receipts*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih/*Op. surplus*	-	-	-	-	-	-
2. Pendapatan kekayaan yang diterima/*Property income receipts*	2 945 115	2 038 914	1 970 234	2 456 989	3 782 596	4 448 651
a. Bunga/*Interest*	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham/*Dividends*	289 071	502 052	942 653	1 769 925	3 323 210	3 754 078
c. Sewa tanah/*Landrent & royalties*	2 656 044	1 536 862	1 027 581	687 064	459 387	694 573
3. Pajak tak langsung/ *Indirect taxes*	3 580 093	5 530 421	6 713 865	9 315 976	12 505 544	13 760 908
a. Pajak import/*Import duty*	-	-	-	-	-	-
b. Pajak hasil produksi DN/*Taxes on domestic goods and services*	3 313 897	5 335 259	6 476 220	9 252 122	12 487 860	13 594 017
c. Pajak tak langsung lainnya/*Other indirect taxes*	266 196	195 162	237 645	63 854	17 684	166 891
4. Pajak langsung/*direct taxes*	7 587 077	8 132 997	9 872 760	13 920 753	18 743 580	20 502 286
a. PPh perseroan minyak /*Oil company income taxes*	-	-	-	-	-	-
b. PPh perseroan bukan minyak/*Non-oil company income taxes*	7 409 613	8 002 889	9 714 330	13 878 183	18 731 790	20 391 025
c. Pajak langsung lainnya/ *Other direct taxes*	177 464	130 108	158 430	42 569	11 789	111 261
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda/*Compulsory fees fines & penalties*	1 128 697	1 489 449	2 079 596	2 540 965	3 550 066	3 953 274
6. Imputasi kesejahteraan pegawai/*Un-funded employee contribution*	-	-	-	-	-	-
7. Transfer dari/*Current transfer from*:	9 337 188	17 107 024	18 526 434	29 672 127	33 429 074	36 961 324
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	9 337 188	17 107 024	18 526 434	29 672 127	33 429 074	36 961 324
b. Sektor lainnya/*Other resident sector*	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN/ *TOTAL RECEIPTS*	**24 578 170**	**34 298 805**	**39 162 889**	**57 906 810**	**72 010 860**	**79 626 443**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran : 2.d NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Appendix *INCOME AND OUTLAY ACCOUNT OF REGENCIAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Pengeluaran/*Expenditure*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi/ *Final consumption expenditure*	46 695 563	59 739 744	78 533 062	87 769 231	109 161 675	140 517 262
2. Pendapatan kekayaan yang dibayarkan/*Property income paid*	110 480	-	-	-	-	-
a. Bunga/*Interest*	110 480	-	-	-	-	-
b. Laba saham/*Dividends*	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah & Royalti /*Land rent & royalties*	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi/*Subsidies*	-	-	-	-	-	-
4. Bantuan sosial/*Social assistance grants*	2 190 999	1 276 574	1 848 892	2 677 792	17 615 937	18 290 701
5. Imputasi kesejahteraan pegawai/ *Unfunded employee welfare*	-	-	-	-	-	-
6. Transfer berjalan kepada/ *Current transfer to* :	906 073	7 206 916	7 155 545	7 790 868	8 482 600	9 204 277
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	906 073	7 206 916	7 155 545	7 790 868	8 482 600	9 204 277
b. Sektor lainnya/*Other resident sectors*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan/*Savings*	3 530 544	14 655 251	1 622 157	30 147 138	11 285 823	- 1 852 324
JUMLAH PENGELUARAN/ TOTAL DISBURSEMENTS	**53 433 660**	**82 878 485**	**89 159 656**	**128 385 029**	**146 546 034**	**166 159 915**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Penerimaan/*Receipts*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih/*Op. surplus*	-	-	-	-	-	-
2. Pendapatan kekayaan yang diterima/*Property income receipts*	8 625 245	6 251 484	4 629 653	3 939 976	4 219 963	5 396 138
a. Bunga/*Interest*	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham/*Dividends*	178 625	372 024	698 513	1 311 527	2 462 522	2 744 401
c. Sewa tanah/*Landrent & royalties*	8 446 619	5 879 460	3 931 140	2 628 450	1 757 441	2 651 738
3. Pajak tak langsung/ *Indirect taxes*	1 416 668	872 124	1 568 223	1 658 393	2 110 133	3 866 130
a. Pajak import/*Import duty*	-	-	-	-	-	-
b. Pajak hasil produksi DN/*Taxes on domestic goods and services*	604 859	596 183	1 076 868	1 538 445	2 076 485	3 559 443
c. Pajak tak langsung lainnya/*Other indirect taxes*	811 809	275 941	491 356	119 948	33 649	306 686
4. Pajak langsung/*direct taxes*	2 528 301	1 674 418	3 019 739	3 926 079	5 213 644	9 103 066
a. PPh perseroan minyak /*Oil company income taxes*	-	-	-	-	-	-
b. PPh perseroan bukan minyak/*Non-oil company income taxes*	1 716 492	1 490 457	2 692 169	3 846 113	5 191 212	8 898 608
c. Pajak langsung lainnya/ *Other direct taxes*	811 809	183 961	327 571	79 965	22 432	204 458
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda/*Compulsory fees fines & penalties*	3 850 296	3 184 238	4 743 210	5 973 258	8 428 221	8 934 325
6. Imputasi kesejahteraan pegawai/*Un-funded employee contribution*	-	-	-	-	-	-
7. Transfer dari/*Current transfer from*:	37 013 150	70 896 221	75 198 830	112 887 322	126 574 073	138 860 256
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	2 765 680	15 056 665	14 726 132	16 033 629	17 457 215	18 213 674
b. Sektor lainnya/*Other resident sector*	34 247 471	55 839 556	60 472 698	96 853 694	109 116 858	120 646 582
JUMLAH PENERIMAAN/ *TOTAL RECEIPTS*	**53 433 660**	**82 878 485**	**89 159 656**	**128 385 029**	**146 546 034**	**166 159 915**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 2.e NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA/ *INCOME AND OUTLAY ACCOUNT OF VILLAGE GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Pengeluaran/*Expenditure*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi/ *Final consumption expenditure*	2 632 161	3 207 541	4 248 825	4 736 450	5 863 899	7 515 743
2. Pendapatan kekayaan yang dibayarkan/*Property income paid*	-	-	-	-	-	-
a. Bunga/*Interest*	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham/*Dividends*	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah & Royalti /*Land rent & royalties*	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi/*Subsidies*	-	-	-	-	-	-
4. Bantuan sosial/*Social assistance grants*	243 444	141 841	205 432	297 532	1 957 326	2 032 300
5. Imputasi kesejahteraan pegawai/ *Unfunded employee welfare*	-	-	-	-	-	-
6. Transfer berjalan kepada/ *Current transfer to* :	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya/*Other resident sectors*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan/*Savings*	20 740	1 218 911	687 117	1 703 049	170 183	59 353
JUMLAH PENGELUARAN/ TOTAL DISBURSEMENTS	**2 896 346**	**4 568 293**	**5 141 375**	**6 737 031**	**7 991 408**	**9 607 396**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Penerimaan/*Receipts*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih/*Op. surplus*	-	-	-	-	-	-
2. Pendapatan kekayaan yang diterima/*Property income receipts*	281 083	223 176	199 194	227 017	327 967	386 946
a. Bunga/*Interest*	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham/*Dividends*	19 847	41 337	77 613	145 725	273 614	304 933
c. Sewa tanah/*Landrent & royalties*	261 236	181 839	121 582	81 292	54 354	82 013
3. Pajak tak langsung/ *Indirect taxes*	403 239	397 455	717 912	1 025 630	1 384 323	2 372 962
a. Pajak import/*Import duty*	-	-	-	-	-	-
b. Pajak hasil produksi DN/*Taxes on domestic goods and services*	403 239	397 455	717 912	1 025 630	1 384 323	2 372 962
c. Pajak tak langsung lainnya/*Other indirect taxes*	-	-	-	-	-	-
4. Pajak langsung/*direct taxes*	-	-	-	-	-	-
a. PPh perseroan minyak /*Oil company income taxes*	-	-	-	-	-	-
b. PPh perseroan bukan minyak/*Non-oil company income taxes*	-	-	-	-	-	-
c. Pajak langsung lainnya/ *Other direct taxes*	-	-	-	-	-	-
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda/*Compulsory fees fines & penalties*	427 811	353 804	527 023	663 695	936 469	992 703
6. Imputasi kesejahteraan pegawai/*Un-funded employee contribution*	-	-	-	-	-	-
7. Transfer dari/*Current transfer from*:	1 784 213	3 593 858	3 697 245	4 820 688	5 342 648	5 854 785
a. Sektor Pemerintah/ *Government sector*	906 073	2 162 075	2 146 663	2 337 260	2 544 780	2 761 283
b. Sektor lainnya/*Other resident sector*	878 140	1 431 783	1 550 582	2 483 428	2 797 868	3 093 502
JUMLAH PENERIMAAN/ *TOTAL RECEIPTS*	**2 896 346**	**4 568 293**	**5 141 375**	**6 737 031**	**7 991 408**	**9 607 396**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran : 3.a NERACA MODAL PEMERINTAHAN UMUM
Appendix *CAPITAL ACCOUNT OF GENERAL GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal/*Capital Formation*						
1. Perubahan stok/*Increase in stock*	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto/*Gross fixed capital formation*	82 561 642	76 436 720	90 212 879	113 721 055	133 689 800	181 307 569
3. Pembelian tanah/*Purchases of land*						
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud/ *Purchases of intangible assets*						
5. Tranfer modal ke/*Capital transfer to*:	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah / *Government sector*	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya/*Other Resident sector*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/ *GROSS CAPITAL FORMATION*	**82 561 642**	**76 436 720**	**90 212 879**	**113 721 055**	**133 689 800**	**181 307 569**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembiayaan Modal/*Finance of gross accumulation*						
6. Tabungan/*Savings*	89 167 200	89 839 124	92 825 795	160 401 393	141 923 092	193 211 612
7. Penyusutan barang modal/*Consumption of fixed capital*	11 189 274	12 017 327	15 987 159	20 680 469	26 737 960	36 261 513
8. Tranfer modal dari/*Capital transfer from*:	427 874	277 963	1 296 064	1 857 212	1 703 800	2 309 097
1. Dalam Negeri/*Domestic*	-	-	14 857	697	345	18 014
a. PBB/*Land and Building Tax*	-	-	-	-	-	0
b. Pemerintah Kabupaten/Kota/*Regencial Governments*	-	-	-	-	-	0
c. Pemerintah Provinsi/*Provincial Governments*	-	-	-	-	-	0
d. Pemerintah Pusat/ *Central Government*	-	-	14 857	697	345	18 014
2. Luar Negeri/*The Rest of the World*	427 874	277 963	1 281 207	1 856 514	1 703 456	2 291 083
9. Pinjaman neto/*Net Borrowing*	- 18 222 707	- 25 697 694	- 19 896 139	- 69 218 019	- 36 675 053	- 50 474 653
JUMLAH PEMBIYAAN MODAL/ *TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION*	**82 561 642**	**76 436 720**	**90 212 879**	**113 721 055**	**133 689 800**	**181 307 569**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 3.b

NERACA MODAL PEMERINTAH PUSAT
CAPITAL ACCOUNT OF CENTRAL GOVERNMENT

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal/*Capital Formation*						
1. Perubahan stok/*Increase in stock*	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto/*Gross fixed capital formation*	47 212 833	48 544 549	36 853 496	58 931 084	64 057 640	72 279 003
3. Pembelian tanah/*Purchases of land*						
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud/ *Purchases of intangible assets*						
5. Tranfer modal ke/*Capital transfer to*:	76 220 020	83 195 769	69 966 498	97 384 944	107 838 100	131 930 955
a. Sektor Pemerintah / *Government sector*	76 220 020	83 195 769	69 966 498	97 384 944	107 838 100	131 930 955
b. Sektor lainnya/*Other Resident sector*						
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*						
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/*GROSS CAPITAL FORMATION*	**123 432 853**	**131 740 318**	**106 819 994**	**156 316 028**	**171 895 740**	**204 209 958**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembiayaan Modal/*Finance of gross accumulation*						
6. Tabungan/*Savings*	85 210 018	72 586 513	87 115 369	109 877 980	110 065 677	187 955 546
7. Penyusutan barang modal/*Consumption of fixed capital*	9 442 567	9 708 910	7 370 699	11 786 217	12 811 528	14 455 801
8. Tranfer modal dari/*Capital transfer from*:	427 874	277 963	1 296 064	1 857 212	1 703 800	2 309 097
1. Dalam Negeri/*Domestic*	-	-	14 857	697	345	18 014
a. PBB/*Land and Building Tax*	-	-	-	-	-	-
b. Pemerintah Kabupaten/Kota/*Regencial Governments*	-	-	-	-	-	-
c. Pemerintah Provinsi/*Provincial Governments*	-	-	-	-	-	-
d. Pemerintah Pusat/ *Central Government*	-	-	14 857	697	345	18 014
2. Luar Negeri/*The Rest of the World*	427 874	277 963	1 281 207	1 856 514	1 703 456	2 291 083
9. Pinjaman neto/*Net Borrowing*	28 352 395	49 166 932	11 037 862	32 794 619	47 314 734	- 510 486
JUMLAH PEMBIYAAN MODAL/ *TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION*	**123 432 853**	**131 740 318**	**106 819 994**	**156 316 028**	**171 895 740**	**204 209 958**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 3.c

NERACA MODAL PEMERINTAH PROPINSI
CAPITAL ACCOUNT OF PROVINCIAL GOVERNMENT

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal/*Capital Formation*						
1. Perubahan stok/*Increase in stock*	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto/*Gross fixed capital formation*						
3. Pembelian tanah/*Purchases of land*	10 135 852	10 848 389	17 258 637	17 815 050	21 314 389	33 373 622
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud/ *Purchases of intangible assets*						
5. Tranfer modal ke/*Capital transfer to*:	1 124 708	1 001 182	1 079 695	1 175 558	1 279 933	1 307 853
a. Sektor Pemerintah / *Government sector*	1 124 708	1 001 182	1 079 695	1 175 558	1 279 933	1 307 853
b. Sektor lainnya/*Other Resident sector*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/*GROSS CAPITAL FORMATION*	**11 260 560**	**11 849 571**	**18 338 332**	**18 990 608**	**22 594 322**	**34 681 475**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembiayaan Modal/*Finance of gross accumulation*						
6. Tabungan/*Savings*	405 897	1 378 449	3 401 152	18 673 227	20 401 410	7 049 035
7. Penyusutan barang modal/*Consumption of fixed capital*	498 535	547 761	3 451 727	3 563 010	4 262 878	6 674 724
8. Tranfer modal dari/*Capital transfer from*:	19 055 005	13 825 970	20 989 949	29 215 483	32 351 430	39 579 287
1. Dalam Negeri/*Domestic*	19 055 005	13 825 970	20 989 949	29 215 483	32 351 430	39 579 287
a. PBB/*Land and Building Tax*	4 977 298	8 744 628	19 851 465	45 065 459	18 029 328	23 711 948
b. Pemerintah Kabupaten/Kota/*Re-gencial Governments*	-	-	-	-	-	0
c. Pemerintah Provinsi/*Provincial Governments*	-	-	-	-	-	0
d. Pemerintah Pusat/ *Central Government*	14 077 707	5 081 342	1 138 484	- 15 849 976	14 322 102	15 867 339
2. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	0
9. Pinjaman neto/*Net Borrowing*	- 8 698 876	- 3 902 609	- 9 504 498	- 32 461 113	- 34 421 395	- 18 621 571
JUMLAH PEMBIYAAN MODAL/ *TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION*	**11 260 560**	**11 849 571**	**18 338 332**	**18 990 608**	**22 594 322**	**34 681 475**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 3.d NERACA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
CAPITAL ACCOUNT OF REGENCIAL GOVERNMENT

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal/*Capital Formation*						
1. Perubahan stok/*Increase in stock*	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto/*Gross fixed capital formation*						
3. Pembelian tanah/*Purchases of land*	22 691 661	16 232 173	34 809 563	35 642 110	45 901 882	71 872 197
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud/ *Purchases of intangible assets*						
5. Tranfer modal ke/*Capital transfer to*:	220 111	720 692	795 061	865 652	942 511	1 022 697
a. Sektor Pemerintah / *Government sector*	220 111	720 692	795 061	865 652	942 511	1 022 697
b. Sektor lainnya/*Other Resident sector*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/*GROSS CAPITAL FORMATION*	**22 911 772**	**16 952 865**	**35 604 624**	**36 507 762**	**46 844 394**	**72 894 894**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/Description	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembiayaan Modal/*Finance of gross accumulation*						
6. Tabungan/*Savings*	3 530 544	14 655 251	1 622 157	30 147 138	11 285 823	- 1 852 324
7. Penyusutan barang modal/*Consumption of fixed capital*	1 162 152	1 672 623	4 906 496	5 064 680	9 180 376	14 374 439
8. Tranfer modal dari/*Capital transfer from*:	56 665 147	41 251 632	48 667 318	69 618 157	72 750 886	89 899 290
1. Dalam Negeri/*Domestic*	56 665 147	41 251 632	48 667 318	69 618 157	72 750 886	89 899 290
a. PBB/*Land and Building Tax*	7 178 204	18 849 974	42 791 941	97 143 383	20 770 997	43 304 097
b. Pemerintah Kabupaten/Kota/*Regencial Governments*	-	-	-	-	-	0
c. Pemerintah Provinsi/*Provincial Governments*	-	-	-	-	-	0
d. Pemerintah Pusat/ *Central Government*	49 486 943	22 401 658	5 875 377	- 27 525 226	51 979 889	46 595 193
2. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	0
9. Pinjaman neto/*Net Borrowing*	- 38 446 071	- 40 626 641	- 19 591 348	- 68 322 212	- 46 372 692	- 29 526 511
JUMLAH PEMBIYAAN MODAL/ *TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION*	**22 911 772**	**16 952 865**	**35 604 624**	**36 507 762**	**46 844 394**	**72 894 894**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lampiran / *Appendix* : 3.e NERACA MODAL PEMERINTAH DESA / *CAPITAL ACCOUNT OF VILLAGE GOVERNMENT*

TAHUN / *YEAR* : 2003-2008

Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008*)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal/*Capital Formation*						
1. Perubahan stok/*Increase in stock*	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto/*Gross fixed capital formation*						
3. Pembelian tanah/*Purchases of land*	2 521 296	811 609	1 291 183	1 332 810	2 415 889	3 782 747
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud/ *Purchases of intangible assets*						
5. Tranfer modal ke/*Capital transfer to*:	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah / *Government sector*	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya/*Other Resident sector*	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/*GROSS CAPITAL FORMATION*	**2 521 296**	**811 609**	**1 291 183**	**1 332 810**	**2 415 889**	**3 782 747**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Lanjutan/*Continued* Juta Rupiah/*Millions of Rupiahs*

Uraian/*Description*	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembiayaan Modal/*Finance of gross accumulation*						
6. Tabungan/*Savings*	20 740	1 218 911	687 117	1 703 049	170 183	59 353
7. Penyusutan barang modal/*Consumption of fixed capital*	86 021	88 033	258 237	266 562	483 178	756 549
8. Tranfer modal dari/*Capital transfer from*:	1 844 688	1 948 153	2 183 985	592 514	4 958 228	4 782 929
1. Dalam Negeri/*Domestic*	1 844 688	1 948 153	2 183 985	592 514	4 958 228	4 782 929
a. PBB/*Land and Building Tax*	-	-	-	-	-	0
b. Pemerintah Kabupaten/Kota/*Regencial Governments*	220 111	720 692	795 061	865 652	942 511	1 022 697
c. Pemerintah Provinsi/*Provincial Governments*	1 124 708	1 001 182	1 079 695	1 175 558	1 279 933	1 307 853
d. Pemerintah Pusat/ *Central Government*	499 868	226 279	309 230	- 1 448 696	2 735 784	2 452 379
2. Luar Negeri/*The Rest of the World*	-	-	-	-	-	0
9. Pinjaman neto/*Net Borrowing*	569 846	- 2 443 488	- 1 838 156	- 1 229 314	- 3 195 699	- 1 816 085
JUMLAH PEMBIYAAN MODAL/ *TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION*	**2 521 296**	**811 609**	**1 291 183**	**1 332 810**	**2 415 889**	**3 782 747**

*) Angka sementara/*preliminary figures*

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

https://www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. Dr Sutomo 6-8 Jakarta 10710
Telp.: (021) 3841195, 3810291-4 Fax. : (021) 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpsgq@bps.go.id